



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan Pembangunan yang tepat sasaran dan terukur di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2023-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh.



Payakumbuh, Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

NIDA FATWA, S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Strategi Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	29
1.5 Landasan Hukum	30
1.6 Sistematika	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
2.1 RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	33
2.2 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	33
2.3 Indikator Kinerja Utama	37
2.4 Perjanjian Kinerja 2023	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	47
3.2 Analisis Capaian Kinerja	49
3.2 Realisasi Anggaran	118
3.3 Prestasi dan Penghargaan	131
BAB IV PENUTUP	133
4.1 Kesimpulan	133
4.2 Permasalahan	133
4.3 Tindak Lanjut	134
LAMPIRAN	136
1) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2) RKT Tahun 2023	
3) SK IKU Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023-2026	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Pangkat/Golongan	3
Tabel 1.2	: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.3	: Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	25
Tabel 1.4	: Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	26
Tabel 1.5	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	29
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	35
Tabel 2.2	: Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	36
Tabel 2.3	: Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	39
Tabel 2.4	: Formula Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	40
Tabel 2.5	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	41
Tabel 2.6	: Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2023	42
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Kinerja	47
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023	48
Tabel 3.3	: Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023	50
Tabel 3.4	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2023	59

Tabel 3.5	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir 2023	60
Tabel 3.6	: Perbandingan Capaian IKU Sasran Strategis 1 Tahun 2023 dengan Standar Nasional	60
Tabel 3.7	: Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2023 .	62
Tabel 3.8	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2023	65
Tabel 3.9	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	66
Tabel 3.10	: Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023	68
Tabel 3.11	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2023	102
Tabel 3.12	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target 2023	103
Tabel 3.12	: Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2023 ..	105
Tabel 3.13	: Perbandingan Capaian IKU Sasran Strategis 2 Tahun 2023 dengan Standar Nasional	104
Tabel 3.14	: Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2023 ..	106
Tabel 3.15	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2023	107
Tabel 3.16	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	108
Tabel 3.17	: Data Perkembangan Usaha Industri Kota Payakumbuh Tahun 2018-2023	110
Tabel 3.18	: Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha .	111
Tabel 3.19	: Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023	112
Tabel 3.20	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2023	113
Tabel 3.21	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2023	114
Tabel 3.22	: Perbandingan Capaian IKU Sasran Strategis 3 Tahun 2023 dengan Standar Nasional	114
Tabel 3.23	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2023	115
Tabel 3.24	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	116
Tabel 3.25	: Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	118
Tabel 3.26	: Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 123

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	: PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan	3
Grafik 1.2	: PNS Berdasarkan Pendidikan	4
Grafik 3.1	: Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja	51
Grafik 3.2	: Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha .	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah Negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal tersebut di mulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu dan akuntabel. Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Tahun 2023-2026. Renstra mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran. Pemerintah Daerah harus memperhatikan

keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dan Renstra Tahun 2023-2026.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan harapan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat kerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Aspek Strategi Organisasi

Aspek strategis organisasi yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

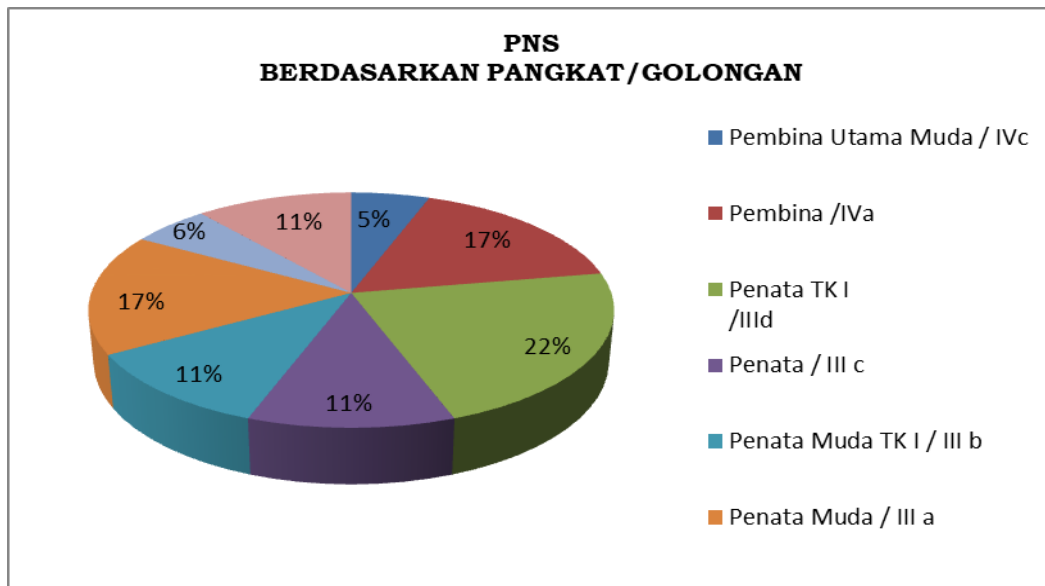
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2023 sebanyak 16 (Enam Belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 7 (Tujuh) orang laki-laki dan 9 (Sembilan) orang perempuan dengan status kepegawaian dan

strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Untuk P3K sebanyak 2 orang. Berikut data kepegawaian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pangkat/Gol	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pembina Utama Muda / IVc		1								1	1
Pembina /IVa	1			1	1				2	1	3
Penata TK I/IIIId		1	1	1	1				2	2	4
Penata/IIIc				1			1		1	1	2
Penata Muda TK I/ IIIb		1					1		1	1	2
Penata Muda/IIIa		2				1				3	3
Pengatur TK I /IIId	1								1		1
Pengatur / IIC (P3K)							1	1	1	1	2
Jumlah	2	5	1	3	2	1	3	1	8	10	18

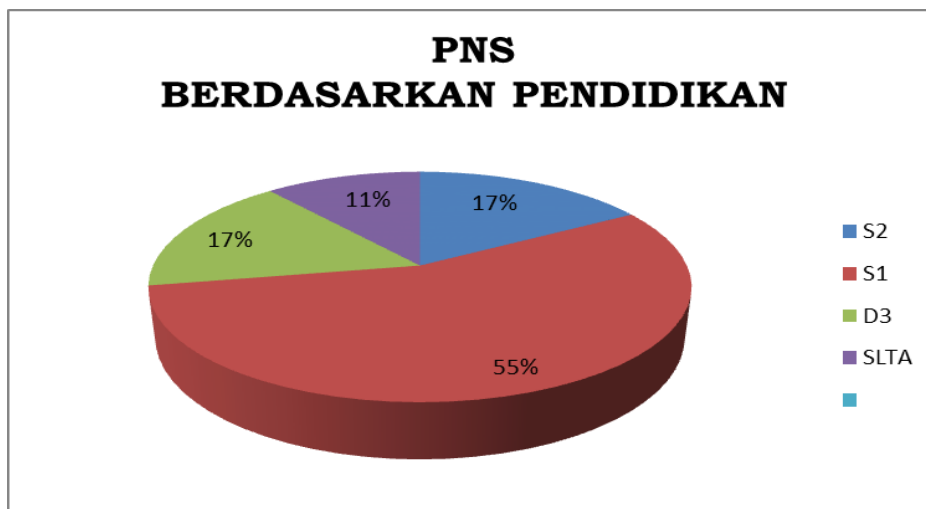
Grafik. 1.1



Tabel 1.2
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pendidikan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD P3R		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S2		1			1		1		2	1	3
S1	1	3	1	3	1	1			3	7	10
D4											
D3							2	1	2	1	3
SLTA	1	1							1	1	2
Jumlah	2	5	1	3	2	1	3	1	8	10	18

Grafik 1.2



1.2.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan unsur pelaksana bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan

Ketenagakerjaan dan Perindustrian berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Tenaga Kerja
4. Bidang Perindustrian
5. UPTD P3R

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;

- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Dinas

Tugas :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaa, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;

- e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;
 - f. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
 - h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;
 - i. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
 - j. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- Uraian Tugas :
- a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menghimpun dan menyusun setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- e. Menghimpun, memadurasi dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- f. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
- g. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari setiap bidang;
- h. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- i. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar lingkup Dinas;

- k. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan Dinas dan kesejahteraan pegawai;
- l. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
- m. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akutansi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personel pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- o. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Tenaga Kerja;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan pelatihan;
- e. Melakukan koordinasi dengan BLK dan lembaga pelatihan lainnya;
- f. Menyusun rencana dan kegiatan pemagangan melaksanakan seleksi terhadap peserta pemagangan;
- g. Melakukan pembinaan organisasi, memberikan perizinan dan rekomendasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

- h. Melakukan pendataan dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan peserta pasca pelatihan dan pemagangan;
 - i. Melakukan pendataan dan pemantauan hasil pelatihan dan pemagangan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - j. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - k. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - m. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Uraian Tugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

- evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;
 - e. Melakukan pendataan dan pelayanan pembuatan AK I sampai dengan AK V;
 - f. Menyusun laporan dan informasi Pencari Kerja;
 - g. Melaksanakan bimbingan kewirausahaan dan tenaga kerja swasta;
 - h. Menyusun data dan naskah informasi lowongan kerja dalam dan luar negeri;
 - i. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja;
 - j. Memproses permintaan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri;
 - k. Melaksanakan seleksi dan pelayanan administrasi terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - l. Merancang dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja luar provinsi/luar negeri;
 - m. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;
 - n. Melaksanakan kegiatan padat karya produktif/infrastruktur;
 - o. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - r. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;

- s. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - u. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
- Uraian Tugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;
 - e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - f. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Pekerja/Serikat Pekerja dan Serikat Buruh fan

- melakukan pencatatan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- g. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap organisasi Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan Lembaga Kerjasama TRIPARTIT;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengesahan serta pemeriksaan berkala tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan;
 - i. Memfasilitasi setiap tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi dan pengadilan hubungan industrial;
 - j. Memfasilitasi setiap permasalahan berkaitan dengan unjuk rasa, mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja;
 - k. Melakukan pembinaan berkaitan dengan sarana hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - l. Memfasilitasi orang terlantar dalam perjalanan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
 - m. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - n. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - p. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perindustrian

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Industri;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Industri;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Industri;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Industri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Sub Substansi Industri Pangan

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;

- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
- e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri pangan;
- f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri pangan;
- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri pangan dan peran serta masyarakat;
- h. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri pangan;
- i. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- j. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri pangan;
- l. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;

- m. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri pangan;
- p. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri pangan;
- q. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri pangan;
- r. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- u. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- v. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri sandang dan kerajinan;
- e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri sandang dan kerajinan;
- f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri sandang dan kerajinan dan peran serta masyarakat;
- h. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri sandang dan kerajinan;
- i. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- j. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri

yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri sandang dan kerajinan;

- k. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- l. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- m. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri sandang dan kerajinan;
- p. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri sandang dan kerajinan;
- q. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri sandang dan kerajinan;
- r. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- u. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- v. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan
- Uraian Tugas:
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan dan peran serta masyarakat;
- h. Menyelenggarakan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan, pedoman dan dampak lingkungan dari hasil industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- i. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- j. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- k. Mengoordinasi dan menyinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- l. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- m. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- n. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- o. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- p. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

- q. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - r. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - s. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan terkait pembinaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - t. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - u. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - w. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - x. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - z. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - aa. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)
Tugas :
Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.

Fungsi :

- a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
- c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

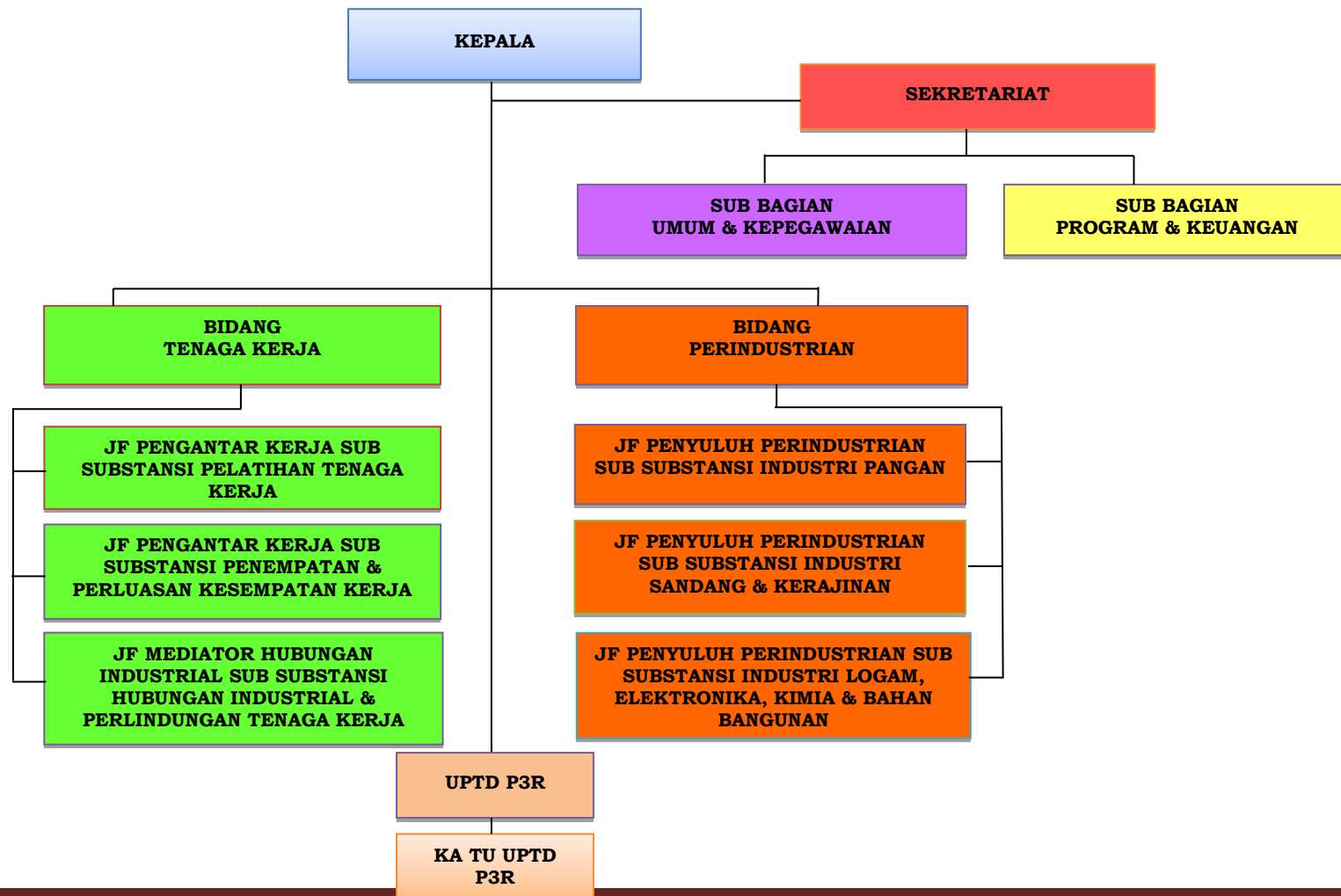
Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat;
- b. Menyusun dan mengelola administrasi pelayanan seperti SOP, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Mekanisme Pengaduan;
- c. Mengelola administrasi umum dan kearsipan meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Mengelola administrasi keuangan;
- f. Mengelola administrasi inventaris Barang dan Asset Milik Daerah;
- g. Menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH



1.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 didukung dengan aspek sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabelberikut ini :

Tabe 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
KotaPayakumbuh

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
1	Gedung	1	Dinas UPTD Sentra Rendang	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik/2 Rusak Ringan
4	Mesin Absen	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/1 Rusak Ringan
5	Filling Kabinet Besi	8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik/5 Berat Berat
6	CCTV	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
7	Papan visual/papan nama	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
8	Papan Tulis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
9	LCD Proyektor/Infocus	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/ Rusak Berat
10	Papan Gambar	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
11	Lemari Kayu	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/7 Rusak Ringan
12	Kursi Besi/Metal	23	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
13	MejaRapat	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
14	MejaResepsionis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
15	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik/4 Rusak Ringan
16	Kursi Putar	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 Baik/4 Rusak Ringan
17	Kursi Biasa	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/3 Rusak Ringan
18	Meja Kumputer	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
19	Meja ½ Biro	21	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/20 Rusak Ringan
20	Lemari Es	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
21	AC	8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6 Baik/2 Rusak Ringan
22	Televisi	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/1 Rusak Ringan
23	Sound System	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik/1 Rusak Ringan
24	Wireless	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Ringan
25	Kamera Video/CCTV	12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8 Baik/4 Rusak Ringan
26	Handy Cam	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
27	Karpet	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
28	Hidran Kebakaran	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
29	P.C Unit	17	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8 Baik/9 Rusak Ringan

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
30	Laptop	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik/3 Rusak Berat
31	Note Book	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik/2 Rusak Berat
32	Hard Disk	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/4 Rusak Berat
33	Printer	17	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8 Baik/6 Rusak Ringan/3 Rusak Berat
34	Scanner	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
35	External/Portable Hardisk	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
36	Meja Kerja Pejabat eselon II, III, IV	10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/6 Rusak Ringan
37	Kursi Kerja Pejabat eselon II, IV	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
38	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik/4 Rusak Ringan
39	Kamera Digital	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
40	Digital LED Running Text	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
41	Sofa	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
42	Camera Film	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/ 1 Rusak Berat

1.2.3. Anggaran/Pembiayaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. Alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	5.514.625.590,-	5.762.646.770,-	269.223.111,-
5.1.01	Belanja Pegawai	2.719.463.800,-	2.613.275.601,-	(106.188.199,-)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.795.161.790,-	3.149.371.169,-	354.209.379,-
5.2	Belanja Modal	94.967.000,-	110.951.000,-	27.255.000,-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.967.000,-	60.951.000,-	15.984.000,-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,-	50.000.000,-	-
	Jumlah Belanja	5.609.592.590,-	5.873.597.770,-	264.005.180,-
	Total Surplus/ Defisit	(5.609.592.590,-)	(5.873.597.770,-)	(264.005.180,-)

1.3. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak, termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak belakunya pembatasan aktifitas, termasuk perekonomian. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami kontraksi

sampai Tahun 2023. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan, tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama 5 tahun. Identifikasi isu strategis urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya serapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

1.4. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Isu Strategis) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis OPD Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mempedomani dokumen perencanaan (Sebelum direviu dan setelah direviu).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Seluruh capaian kinerja agar dilengkapi dengan dokumen foto.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis dan persentase capaian kinerja keuangan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Capaian prestasi dan penghargaan dilengkapi dengan dokumen foto dan penjelasan mengenai prestasi dan penghargaan yang diterima.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

2.1.1. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. 5 (lima) Tujuan Kota Payakumbuh yang terkait Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdapat pada Tujuan 2 yaitu :

“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”

2.1.2. Sasaran

Untuk merealisasikan Tujuan yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh pemangku kepentingan, 12 Sasaran Kota Payakumbuh yang menjadi Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yaitu :

Sasaran 4 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran 5 : Meningkatnya Sektor Strategis

Dengan memperhatikan penjabaran Sasaran Walikota Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan Sasaran 4 dan Sasaran 5

2.2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

disesuaikan dengan sasaran dan indikator pada urusan tenaga kerja dan perindustrian. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh serta berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

2.2.1. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang ada dibidang tenaga kerja dan perindustrian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatnya sektor strategis.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya produksi industri pengolahan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun				Kondisi Akhir
							2023	2024	2025	2026	
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	95,16	93,75	93,75	93,77	93,77	93,77
2	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	5,63	3,00	3,25	3,30	3,35	3,35
3	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A

2.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah yang berisikan program prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 4 tahun periode Renstra. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026

Tujuan RPD	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran RPD	1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	1. Meningkatkan Upaya Penurunan Angka Pengangguran	1. Meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja
			2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja yang Berbasis Digital dan Teknologi Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar
			3. Mengembangkan Klaster Industri, Kemitraan dan Pemanfaatan Teknologi Untuk Menyerap Tenaga Kerja
			4. Pelaksanaan Inkubasi Bisnis Penciptaan Pengusaha Muda Baru Sebagai Skema Pemulihan Ekonomi
			5. Menciptakan Entrepeneur Dari Berbagai Sektor

Sasaran RPD		2. Meningkatnya Sektor Strategis	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Sektor Industri	1. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	1. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Industri Berbasis Sumberdaya Lokal
		2. Meningkatnya SDM Pelaku Industri	2. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan bagi Pelaku Industri Kecil
		3. Meningkatkan Penerapan Standarisasi Mutu Produk	3. Menyediakan SDM Pelaku Industri yang Berkualitas
		4. Meningkatkan Penerapan Teknologi	4. Memberikan Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk
		5. Meningkatkan Kualitas Input Industri	5. Mendorong dan Mendukung Kerjasama Penerapan Teknologi, inovasi dan Peningkatan Kreativitas Pelaku Usaha Industri
		6. Meningkatkan Pengawasan Usaha Industri	6. Membangun Peta Potensi Sumber Daya Alam yang Berkualitas
		7. Meningkatkan Entrepreneurship	7. Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Peningkatan Produksi
		8. Merumuskan Kebijakan Penanaman Modal Terutama Pembiayaan Produksi	

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan dasar dalam penilaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan sejalan dengan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	95,16	93,75	93,75	93,77	93,77	93,77
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	5,63	3,00	3,25	3,30	3,35	3,35
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A

Tabel 2.4
Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Formula
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada tahun n di bagi jumlah angkatan kerja tahun n kali seratus persen
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	Memenuhi SPM Kementerian Perindustrian	Nilai Produksi Th (n) - Nilai Produksi Th (n-1) dibagi Nilai Produksi Th (n-1) kali seratus persen
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	A

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6
 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	54.345.976	50.208.471	92,39%
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	5.647.976	4.714.700	83,48%
			Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan	440.189.118	421.169.864	95,68%
			Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	27.447.880	27.097.640	98,72%
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	85.548.146	78.229.042	91,44%
			Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.538.150	19.638.500	83,43%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.079.150	3.330.150	81,64%
Jumlah Anggaran Sasaran 1						640.796.220	604.388.367	94,32%
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	174.593.340	132.186.300	75,71%
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri	555.687.870	539.061.201	97,01%
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	31.108.120	30.031.528	96,54%
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	507.653.731	497.026.542	97,91%
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	142.053.558	140.956.733	99,23%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	357.838.140	295.576.779	82,60%
Jumlah Anggaran Sasaran 2						1.768.934.759	1.634.839.083	92,42%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.917.040	17.423.620	97,25%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.998.950	16.894.190	93,86%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.106.000	87.883.900	97,53%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.436.371.905	1.975.008.695	81,06%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.851.200	173.551.200	98,13%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.600.000	12.600.000	100%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.998.150	1.993.900	99,79%
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.882.000	16.382.000	86,76%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.651.250	31.854.420	97,56%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.193.180	21.896.275	98,66%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.004.560	5.580.000	92,93%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000	10.478.750	99,80%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.340.000	182.279.054	99,97%
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.851.000	35.546.000	93,91%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.205.000	2.200.000	99,77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
				Urusan Pemerintahan Daerah				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.947.468	148.240.616	87,23%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.250.488	116.229.727	99,13%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	39.110.042	99,80%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.400.000	56.714.671	95,48%
					Pemeliharaan Mebel	5.638.600	5.233.600	92,82%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000	5.654.900	94,72%
Jumlah Anggaran Sasaran 3						3.463.866.791	2.962.755.560	85,53%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa kinerja financial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antar target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (Penentuan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Baik
2	76,00 – 90,99	Baik
3	66,00 – 75,99	Cukup
4	51,00 – 65,99	Kurang
5	$\leq 50,99$	Sangat Kurang

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026 yang terdapat pada :

Sasaran 4 : Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

Sasaran 5 : Meningkatnya sektor strategis

Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai Tujuan Walikota serta Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Kriteria Kinerja
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	93,75	95,16	101,50	Sangat Baik
Meningkatnya Sektor Strategis	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	3,00	5,63	187,67	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100	Sangat Baik

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 5.873.597.779,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp. 5.201.983.010,-

Persentase : 88,57%

Dari tabel diatas, ketiga sasaran strategis yang terbagi dalam tiga indikator kinerja. Pada Tahun 2023, 2 indikator telah melebihi terget yang ditetapkan dan satu indikator sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian yang tertinggi pada indiktor Persentase Peningkatan Nilai Produksi

dengan capaian 187,67%, diikuti indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dengan capaian 101,50% dan indikator Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat dengan capaian 100%.

Dari capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang melebihi target, diharapkan ke depannya program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tetap berlanjut dengan capaian yang lebih baik lagi.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 melalui 3 (Tiga) sasaran dan 3 (Tiga) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (Tiga) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

Sasaran strategis ini merupakan salah satu komponen upaya mencapai tujuan Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan peningkatan serapan tenaga kerja melalui yaitu :

1. Pelatihan kerja
2. Pemagangan
3. Fasilitasi penempatan tenaga kerja

Upaya ini dilakukan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja meningkat sehingga mampu berkompetisi di pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%	95,16%	101,50%	Sangat Baik

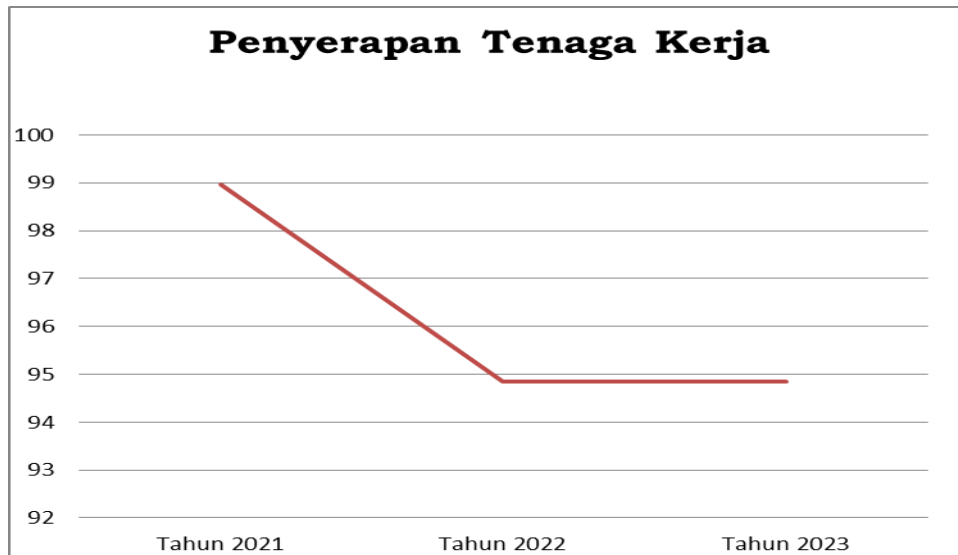
Dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja Tahun 2023}}{\text{Jumlah angkatan kerja Tahun 2023}} \times 100\% \\ &= \frac{74.137}{77.907} \times 100\% \\ &= \mathbf{95,16\%} \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel diatas mempunyai 1 (Satu) indikator diperoleh melebihi dari target. Indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja realisasi sebesar 95,16% dari target sebesar 93,75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adapun persentase capaian kinerjanya 101,50% dengan tingkat capaian melebihi target dalam kiteria Sangat Baik.

Rumusan indikator didapat dari kenaikan jumlah penduduk bekerja pada Tahun 2022 sebanyak 70.127 orang sedangkan Tahun 2023 jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 74.137 orang atau naik 5,72%.

Grafik 3.1
Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja



Capaian indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2023 sebesar 93,75%, dari target yang ditetapkan terealisasi sebesar 95,16%, telah melebihi target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator diatas melalui :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Kegiatan yang dilaksanakan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Tahun 2023-2028.
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Kegiatan yang dilaksanakan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja bagi perusahaan ditargetkan 1 perusahaan.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

Untuk Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pelatihan membuat aneka macam roti/kue sebanyak 3 angkatan.
 - Angkatan 1 telah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 26 Mei 2023, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh
 - Angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 21 Juni 2023 sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh
 - Angkatan ke 3 telah dilaksanakan pada tanggal 8 November sampai dengan 30 November 2023, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh
- b. Pelatihan menjahit pakaian dasar sebanyak 2 angkatan.
 - Angkatan 1 mulai 20 Juli sampai dengan 11 Agustus 2023, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh
 - Angkatan 2 mulai pada tanggal 14 Agustus sampai dengan 6 September 2023 sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh

Angkatan 1 Pelatihan Processing Roti/Kue



Angkatan 2 Pelatihan Processing Roti/Kue



Angkatan 3 Pelatihan Processing Roti/Kue



Angkatan 1 Pelatihan Menjahit



Angkatan 2 Pelatihan Menjahit



3. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan kewirausahaan, sudah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli sampai dengan 7 Juli 2023 dengan peserta 20 orang bertempat di Hotel Mangkuto Kota Payakumbuh.

Pelatihan kewirausahaan



2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan pembuatan AK-1 bagi pencari kerja yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Informasi Bursa Kerja Online tentang lowongan pekerjaan melalui sistem Ketenagakerjaan (SISNAKER) Kementerian Tenaga Kerja. Melalui aplikasi Sisnekaer ini, seluruh masyarakat pencari kerja dan masyarakat usia kerja dapat memperoleh segala bentuk informasi terkait dengan ketenagakerjaan, seperti Lowongan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan dll. Selain melalui aplikasi Sinaker, penyebaran informasi bursa kerja melalui media sosial seperti Facebook, Instagram Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Keadaan sampai bulan Desember 2023 pencari kerja yang mengurus AK 1 berjumlah 289 orang.

Pelayanan Pembuatan AK-1



a) Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Payakumbuh Tahun 2023

PENDIDIKAN	Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	1	-	1
SLTP	8	1	9
SLTA	82	79	161
DIPLOMA I	1	-	1
DIPLOMA II	-	-	-
DIPLOMA III	10	7	17
D IV/SARJANA S.I	37	63	100
PASCA-SARJANA / S.II	-	-	-
Jumlah	139	150	289

b) Penempatan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Payakumbuh Tahun 2023

PENDIDIKAN	Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	1	-	1
SLTP	8	1	9
SLTA	44	36	80
DIPLOMA I	-	-	-
DIPLOMA II	-	-	-
DIPLOMA III	5	5	10
D IV/SARJANA S.I	21	27	48
PASCA-SARJANA / S.II	-	-	-
Jumlah	79	69	148

c) Tenaga Kerja yang telah disalurkan Tahun 2023

No.	Keterangan	Tahun 2023 (orang)
1.	Tenaga Kerja Indonesia ke LN	26
2.	Dalam Negeri (Swasta)	48
3.	Dalam Negeri Lainnya	74
4.	Magang ke Malaysia	-
5.	Magang ke Thailand	-
6.	Magang ke Jepang	-
	Jumlah	148

4. Program Hubungan Industrial pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan pembinaan ke perusahaan sampai bulan Agustus 2023 sebanyak 6 perusahaan.
Kegiatan pencegahan perselisihan HI sebanyak 6 perkara : (PT Pinang Sakti Indonesia) masalah upah, jam kerja, Jaminan sosial tenagakerja dan deskriminasi gender 20 orang (4 perkara), PT BPR Pejuang 45 pencegahan kasus perselisihan PHK (1 perkara) 2 orang, PT Pratama Abadi Semesta pencegahan perselisihan pengurangan/dirumahkan karyawan (1 perkara) 20 orang.
- Kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan peserta 50 perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023, dengan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Sosialisasi Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan



- 2) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelesaian kasus yang masuk sampai tanggal 25 September 2023 sebanyak 4 kasus (PT denai Kabel Mandiri, Tiffani Houseware, BPR Harau (Perrjanjian Bersama dan BRI sedang tahap sidang dipengadilan hubungan industrial padang).

Penyelesaian Kasus Yang Masuk



Anggaran pendukung untuk indikator Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar Rp. 640.796.220,- dan teralisasi sebesar Rp. 604.388.367,- atau sebesar 94,32%.

1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2023 :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,55%	98,96%	93,55%	94,84%	93,75%	95,16%

Capaian sasaran strategis pertama Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, persentase penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2021 realisasi sebesar 98,96% di Tahun 2022 turun sebesar 94,84% dan di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 95,16%, hal ini di sebabkan banyaknya penduduk usia kerja yang mendapatkan kesempatan bekerja dari perusahaan sehingga formasi dapat dipenuhi oleh pencari kerja sesuai dengan keahlian dibutuhkan.

1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	% Capaian
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	95,16%	93,77%	101,50%

Tahun 2023 merupakan tahun ke 1 Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 95,16%, yang berarti melampaui target capaian akhir Renstra sebesar 93,77%, atau memiliki persentase capaian 101,50%.

1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target/Standar Nasional
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	95,16%	94,68%

Sasaran strategis 1 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja realisasi capaian sebesar

95,16% sudah mencapai target nasional, yang target/standar nasional sebesar 94,68%.

1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya penyebarluasan informasi pasar kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui pasar kerja online, media sosial dinas (Facebook, Instagram) website dinas, aplikasi My Kopay dan manual;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui kegiatan pelatihan dan pemagangan dan dukungan dari pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program-program pelatihan berbasis kluster kompetensi yang dilaksanakan di BLK Payakumbuh yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta kerjasama dengan pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP);
3. Adanya kegiatan memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar provinsi/luar negeri;
4. Potensi untuk lapangan kerja sektor informal yang bisa diserap oleh UKM dan IKM di Kota Payakumbuh sangat besar;
5. Potensi pencari kerja sektor informal yang cukup besar.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya ketersediaan lowongan pekerjaan sektor formal;
2. Masih adanya lowongan pekerjaan belum terisi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja;
4. Masih adanya pencari kerja yang belum memiliki keterampilan

- dan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja;
5. Keterbatasan permodalan untuk membuka usaha baru.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana promosi lowongan kerja/pasar kerja yang lebih representatif dan Penambahan personil pejabat fungsional pengantar kerja;
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja;
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan peningkatan produktifitas dan up-skill bagi tenaga kerja;
4. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru melalui perbankan dan bantuan-bantuan lain melalui program Pemerintah Pusat.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,75%	95,16%	101,50%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dalam meningkatkan kompetensi SDM pencari kerja - Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Padang, Medan, Semarang, Bandung, Serang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana promosi lowongan kerja/pasar kerja yang lebih representatif dan Penambahan personil pejabat fungsional pengantar kerja 2. Melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan peningkatan produktifitas dan up-skill bagi tenaga kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
							4. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru melalui perbankan dan bantuan-bantuan lain melalui program Pemerintah Pusat

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja mempunyai 1 indikator sasaran yaitu Persentase penyerapan tenaga kerja dengan tingkat capaian rata-rata lebih dari 100%.

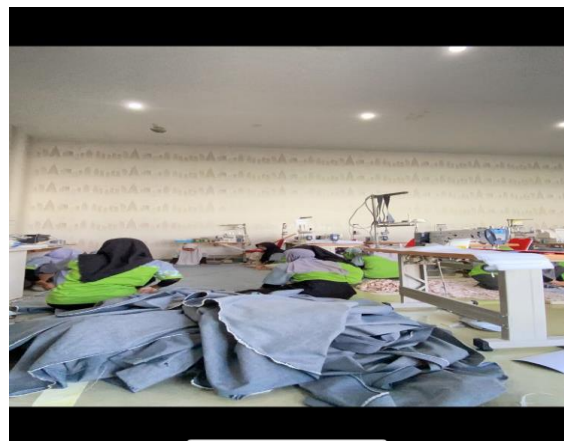
Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis dikarenakan program pemulihan ekonomi daerah, dimana salah satu kegiatan adalah dengan memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat/pencari kerja yang tidak mempunyai keahlian/keterampilan, anak yang menganggur/putus sekolah, anak yang kurang mampu serta masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM.

Komponen yang menunjang keberhasilan adalah selain dari sumber dana APBD sebanyak 80 orang dan ditambah adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti :

- Mengirim peserta pelatihan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Padang : 6 orang
 - Pelatihan service hp sebanyak 2 orang;
 - Pelatihan teknisi engine tune up sepeda motor sebanyak 1 orang;
 - Pelatihan las SMAW 3G sebanyak 2 orang;
 - Pelatihan system boarding dan Barista 1 orang.
- Mengirim peserta pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) : 36 orang
 - Semarang, Pelatihan Jurusan Pembuat Pakaian sebanyak 3 orang;

- Bandung, Pelatihan Jurusan Perawatan dan Pemeliharaan mesin manufaktur sebanyak 3 orang;
- Serang, Pelatihan Jurusan Listrik sebanyak 8 orang;
- Medan, Pelatihan barista sebanyak 5 orang, teknik cat semprot sebanyak 1 orang, babershop sebanyak 4 orang, commis pastery sebanyak 3 orang, commercial cooking sebanyak 4 orang, tukang pasang baja ringan sebanyak 1 orang, roasting coffee sebanyak 4 orang.

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)



1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8
 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja				640.796.220	604.388.367	94,32%	5,68
	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,75%	95,16%	101,50%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja pada Tahun 2023, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Sangat Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 5,68 dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 94,32%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dengan hasil tingkat capaian lebih dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 6 orang yang terdiri dari : 4 ASN dan 2 TJP.

1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 1, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan

menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
1	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	95,16%				
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	12,500%	Menunjang
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	100%	Menunjang
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	124,74%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	125%	Menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	110,49%	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	125%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penyebarluasan informasi kerja	125%	Menunjang
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3,23%	Menunjang
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	133%	Menunjang

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan Meningkatnya Sektor Strategis. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan peningkatan produksi industri pengolahan melalui :

1. Pembinaan dan pelatihan bagi IKM;
2. Pelatihan sarana produksi Teknologi Tepat Gunga (TTG) bagi IKM;
3. Fasilitasi kegiatan Dekranasda;
4. Fasilitasi dalam pengurusan sertifikasi halal;
5. Monitoring dan evaluasi IKM.

Upaya ini dilakukan untuk membentuk IKM yang berkualitas dan mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatkan produksi dari industri IKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%	5,63%	187,67%	Sangat Baik

Dengan rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Nilai Produksi Th 2023} - \text{Nilai Produksi Th 2022}}{\text{Nilai Produksi Th 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{284.598.221.000 - 269.426.788.000}{269.426.788.000} \times 100\%$$

$$= \mathbf{5,63\%}$$

Pada Sasaran 2 ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 187,67% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini disebabkan dengan sudah berangsur pulihnya sektor-sektor ekonomi.

Capaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Tahun 2023 mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya, yang mana pada Tahun 2022 sebesar 3,1% sedangkan Tahun 2023 sebesar 5,63%, melebihi dari target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator diatas melalui :

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - Penyusunan Dokumen RPIK Tahun 2023-2043
Kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2023-2043 yang dilengkapi dengan 1 buah dokumen

Naskah Akademis dan Ranperda RPIK Payakumbuh Tahun 2023-2043.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Focus Grup Discussion (FGD)



- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

➤ Operasional Dekranasda Kota Payakumbuh

Dekranasda Kota Payakumbuh merupakan mitra utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam membina dan mempromosikan produk IKM, terutama sekali produk Industri Sandang dan Kerajinan.

Sub kegiatan ini memberikan dukungan anggaran terhadap operasional Dekranasda Kota Payakumbuh seperti kebutuhan administrasi, penyelenggaraan

rapat, menghadiri undangan rapat / pertemuan dari Dekranas RI, Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, dan/atau pihak lain yang terkait dengan tugas Dekranasda Payakumbuh.

Kegiatan yang dilaksanakan dan/atau diikuti oleh Dekranasda
Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Kegiatan	Penyelenggara	Jadwal	Keterangan
1	Rapat Pengurus	Dekranasda Payakumbuh	Kamis / 9 -2- 2023	Pembahasan Program & Kegiatan Tahun 2023
2	Rapat Pengurus	Dekranasda Payakumbuh	Senin / 13 -2 - 2023	Pembahasan Program & Kegiatan Tahun 2024
3	Inacraft I 2023	ASEPHI dan Mediatama	1 s/d 6 – Maret 2023	Pameran UMKM di JCC Jakarta
4	Muffest + 2023	Indonesian Fashion Chamber dan Ditali	7 s/ 10 – 3 - 2023	Event Fashion Show di The Westin Hotel, Jakarta
5	HUT Dekranas Ke- 43	Dekranas Pusat	16 s/d 21 - 5 - 2023	HUT Dekranas dan Pameran di Medan
6	Workshop Kerajinan dari Bambu	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	19 s/d 23 - 6 - 2023	Workshop Kerajinan Bambu
7	Payakumbuh Local	Payakumbuh	24 s/d 26	Event Fashion Show dan

No	Kegiatan	Penyelenggara	Jadwal	Keterangan
	Brand 2023	Local Brand	- 6 - 2023	Pameran
8	Pertemuan Istri Kepala Daerah (Iskada)	Dekranasda dan PKK Payakumbuh	Senin / 10 - 7 - 2023	Penampilan Seni dan Fashion Show
9	Payakumbuh Botuang Festival 2023	Disparpora dan Dekranasda Payakumbuh	13 s/d 15 - 7 - 2023	Pameran UMKM, seni pertunjukan, festival budaya, festival bambu.
10	Rapat Pengurus	Dekranasda Payakumbuh	Kamis / 3 - 8 - 2023	Pembahasan Kegiatan Akhir Tahun 2023
11	Rapat Kerja	Dekranasda Prov. Sumbar	Selasa / 15 - 8 - 2023	Pembahasan Program Dekranasda Prov. Sumbar 2023
12	Rapat Pengurus	Dekranasda Payakumbuh	Rabu / 16 - 8 - 2023	Persiapan Pawai Alegoris
13	Rapat Pengurus	Dekranasda Payakumbuh	Senin / 4 - 9 - 2023	Persiapan Event Akhir Tahun
14	World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2023	Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumbar	6 s.d. 9 - 9 - 2023	Pameran UMKM, Fashion Show, dan Diskusi / Summit
15	Pameran Kriyanusa	Dekranas Pusat	13 s.d. 17 - 9 - 2023	Pameran Kriyanusa di JCC, Jakarta
16	Pelatihan Batik Cap	Disnakerperin dan Dekranasda	25 s/d 27 - 9 - 2023	Pelatihan dilaksanakan di

No	Kegiatan	Penyelenggara	Jadwal	Keterangan
		Payakumbuh		kantor Disnakerperin
17	Inacraft II dan Minangkabau Heritage	ASEPHI, Mediatama, dan Dekranasda Prov. Sumbar	4 s/d 8 - 10 - 2023	Pameran, Fashion Show, dan Pagelaran Seni Pertunjukan
18	Lomba Desain Batik Minang	Dekranasda Prov. Sumbar	Sabtu / 7 - 10 - 2023	Lomba dilaksanakan di Sawah Lunto
19	Sertijab Ketua Dekranasda Payakumbuh	Dekranasda dan PKK Payakumbuh	Selasa / 10 - 10 - 2023	Serah terima jabatan Ketua Dekranasda Kota Payakumbuh
20	Lomba Desain Busana Muslimah	Dekranasda Prov. Sumbar	Rabu / 25 - 10 - 2023	Kantor Dekranasda Prov. Sumbar
21	Lomba Desain Motif Batik Payakumbuh	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	27-10-2023 s/d 14-11-2023	Pendaftaran, penilaian awal dan penilaian akhir hingga pengumuman pemenang
22	Spotlight 2023	Indonesian Fashion Chamber dan Ditali	17 s/d 19 - 11 - 2023	Event Fashion Show, Posbloc, Jakarta
23	Pedati	Pemko Bukittinggi	9 s/d 21 - 12 - 2023	Pameran UMKM
24	Payakumbuh Barolek Godang (Bagodang)	Pemko Payakumbuh	13 s/d 17 - 2023	Seni Pertunjukan, pameran UMKM,

No	Kegiatan	Penyelenggara	Jadwal	Keterangan
				fashion carnival, pasar rakyat
25	Payakumbuh Fashion Carnival Tahun 2023	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	Kamis / 14 - 12 - 2023	Fashion Carnival + Pawai Budaya dan Multi etnis
26	Launching Motif Batik Payakumbuh	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	Minggu / 17 - 12 - 2023	Launching motif batik payakumbuh di Balaikota

➤ Workshop Kerajinan dari Bambu

Workshop kerajinan dari bambu dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 15 orang yang sebagian besar berasal dari Sawah Padang Auakuniang lokasi sentra bambu. Instruktur dalam workshop ini adalah Bapak Amrizal, S.Pd, MA; Ketua Prodi Pendidikan Kria ISI Padang Panjang. Kerajinan dari bambu yang diproduksi dalam pelatihan antara lain souvenir dari bambu yang berbentuk cangkir, tumbler, sepeda, gantungan kunci, dan produk anyaman bambu.

Workshop Kerajinan dari Bambu



➤ Muslim Fashion Festival + (Muffest) 2023

Event ini diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) bekerjasama dengan Ditali pada tanggal 7 - 10 Maret 2023 di The Westin Hotel, Jakarta. Dekranasda Kota Payakumbuh ikut ambil bagian dalam event ini yaitu untuk penampilan fashion show dan pameran produk IKM Fashion Payakumbuh. Untuk Fashion Show, Dekranasda Kota Payakumbuh bekerja sama dengan desainer local Payakumbuh Berry Mirsha Saleppy. Dekranasda Kota Payakumbuh menampilkan 8 pakaian show.

Penampilan Dekranasda Kota Payakumbuh x Berry Mirsha dalam Event Muffest + Tahun 2023



➤ Payakumbuh Local Brand

Dalam rangka mendukung kreatifitas desainer lokal Kota Payakumbuh. Dekranasda Kota Payakumbuh turut berpartisipasi memeriahkan event Payakumbuh Local Brand. Event ini diikuti oleh para Desainer Lokal Kota Payakumbuh seperti Feymil Chang, Berry Mirsha, D'Fitra Nats, Muthis, Hilman Samudera, dll. Event ini juga mengundang para

desainer dari luar kota Payakumbuh dan member IFC untuk turut menampilkan karyanya dalam event tersebut, sebut saja nama-nama populer seperti Fomalhout Zamel dan Rella Tulusia. Selain fashion show, event ini juga menggelar pameran UMKM Kota Payakumbuh.

Event ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2023 di Gor M. Yamin Payakumbuh. Dalam Event ini Dekranasda Kota Payakumbuh menampilkan kembali koleksi yang pernah ditampilkan dalam Minangkabau heritage tahun 2022, busana karya duo Berry Mirsha dan Hilman Samudera.

Penampilan Dekranasda Kota Payakumbuh x Berry Mirsha & Hilman Samudera dalam Event Payakumbuh Local Brand Tahun 2023



- World Islamic Entrepreneur Summit (WIES)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumatera

Barat menyelenggarakan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) pada tanggal 6-9 September 2023 di Hotel Pangeran Beach, Padang.

Dalam event ini dilaksanakan pertemuan dan diskusi antara seluruh stakeholder di bidang wirausaha untuk membicarakan perkembangan dunia usaha utamanya pariwisata dan ekonomi kreatif ke depannya.

Desainer Binaan Dekranasda Kota Payakumbuh tampil dalam Event WIES Tahun 2023 di Kota Padang



➤ **Spotlight Tahun 2023**

Di penghujung Tahun 2023, IFC bersama Ditali kembali menggelar Event Fashion Show Spotlight yang mengangkat tema Culture : Then and Now. Dekranasda Kota Payakumbuh kembali memanfaatkan momen promosi produk Industri Sandang dan Fashion Kota Payakumbuh yaitu Tenun Balai Panjang dengan menggandeng desainer local Payakumbuh Feymil Chang. Tema yang diangkat oleh

Dekranasda Payakumbuh dan Feymil Chang adalah Alif ().

Event ini dilaksanakan tanggal 15 -19 November 2023 di Posbloc, Jakarta dan Dekranasda Kota Payakumbuh mendapatkan jadwal tampil pada tanggal 18 November 2023 jam 12.30-14.00 WIB.

Spotlight Tahun 2023



➤ **Pengadaan Benang**

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas produksi serta daya saing produk tenun balai panjang, maka Pemerintah Kota Payakumbuh melalui dana insentif fiskal memberikan bantuan benang kepada Sentra Tenun Balai Panjang. Harapannya, benang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan produksi dan bisa meningkatkan daya saing melalui harga pokok produksi yang kompetitif sehingga memberikan dampak yang baik juga terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

Pengadaan benang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH PRODUK	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
1	Benang Cootton Combed (Katun Mesrais)	83	1.199.900	99.591.700	Benang viscos rayon merek double penguin (setara) dengan rincian sebagai berikut Nomor benang, 1035,1042,1054,1066,1071,1088,1089,1127,1130,1144,1151,1157,1160,1161,1171,1179,1196,1210,1208,1292,1301,1305,1321,1331,2025,2155 dengan jumlah masing-masing nomor benang adalah 22 lusin. sedangkan untuk nomor benang 1172, 1072, 1050 dan 1180 dengan jumlah masing-masing 25 lusin
2	Benang Bordier (Viscose Rayon)	672	174.900	117.532.800	Benang cotton combed mesrais, ukuran 64/2 dengan warna: Hitam sebanyak 33 pak Merah sebanyak 10 pak Abu Muda sebanyak 10 pak Krem sebanyak 30 pak

Benang-benang tersebut kemudian diserahkan kepada Sentra Tenun Balai Panjang dan dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

Pemeriksaan Barang, Serah Terima Pekerjaan, dan Serah Terima Barang dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kepada Senta Tenun Balai Panjang



d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- Pelatihan dan workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui TTG.

Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25 s.d 27 Juli 2023 yang dilaksanakan di Bengkel Surau Pandam Teknik di Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur dengan Instruktur pelatihan / berasal dari INDRA KESUMA BENI ANWAR / PAYAKUMBUH WELDER yang sudah berlisensi BNSP, dengan peserta 10 orang IKM las. Kegiatan ini difokuskan pada materi penjelasan model TTG yang dibuat berupa mesin pembelah bambu dengan sistem berkelompok.

Pelatihan dan Workshop Penguatan Peralatan Produksi
Bagi IKM Melalui TTG



e. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksa/naan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Kegiatan UPTD P3R Sentra Rendang

- Operasional Rutin. Operasional rutin terkait dengan penyelenggaraan administrasi tata usaha, praktek produksi, kebersihan, rapat penyambutan tamu, pembayaran listrik, belanja jasa (operator mesin, kebersihan dan keamanan).
- Pemeliharaan. Pekerjaan ini meliputi pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga serta pemeliharaan gedung kantor.



- Kegiatan Produksi Rendang



- Kunjungan Tamu ke UPTD P3R Sentra Rendang

DAFTAR KUNJUNGAN SENTRA IKM RENDANG
TAHUN 2023

Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
04 Januari 2023	Kunjungan DPRD Kota Payakumbuh	120
13 Januari 2023	Kunjungan CHEF Wiliam Wongso	
18 Januari 2023	Kunjungan BPOM Kota Payakumbuh	
18 Januari 2023	Kunjungan Provinsi Sumatera Barat	
30 Januari 2023	Kunjungan dari Arab	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
Februari 2023	Kunjungan dari Pengusaha Rendang	84
07 Februari 2023	SCHOOL OF RANDANG SD/SMP Kota Payakumbuh dalam rangka penilaian inovasi Kota Payakumbuh.	
17 Februari 2023	Kunjungan Kantor Pos Kota Payakumbuh	
24 Februari 2023	Kunjungan IKM ASMAMI Kota Jambi	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
21 Maret 2023	Kunjungan BPOM Kota Payakumbuh	160
29 Maret 2023	SCHOOL OF RANDANG SMA 1 Kota Payakumbuh	
30 Maret 2023	Kunjungan dari Tapanuli Selatan	
31 Maret 2023	Kunjungan Mahasiswa Kampus Unand Kota Padang	

Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
10 April 2023	Kunjungan dari TV TVRI	200
12 April 2023	Kunjungan TIM penilai Provinsi SUMBAR	
13 April 2023	Kunjungan TIM HACCP	
26 April 2023	Kunjungan dari Hotel Borobudur	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
10 Mei 2023	Kunjungan Para Pengusaha Rendang (bp. Erwin dkk)	150
11 Mei 2023	Kunjungan dari BPOM Kota Pekanbaru	
25 Mei 2023	SCHOOL OF RANDANG	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
05 Juni 2023	Kunjungan Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Andalas Kota Padang tentang School Of Randang	350
05 Juni 2023	Kunjungan Dinas Pesisir Selatan	
08 Juni 2023	Kunjungan Dinas Koperasi Tanah Datar	
15 Juni 2023	Kunjungan Mahasiswi Universitas Andalas Kota Padang tentang School Of Randang	
15 Juni 2023	Kunjungan dari tamu Investor Rendang (tamu pak rendi pratama)	
23 Juni 2023	SCHOOL OF RANDANG UDA & UNI Kota Payakumbuh	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
03 Juli 2023	Kunjungan dari Pengusaha Rendang dari Singkarak	80
24 Juli 2023	Kunjungan dari dinas Tenaga Kerja Provinsi	
27 Juli 2023	Kunjungan dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
09 Agustus 2023	Kunjungan	50
18 Agustus 2023	Kunjungan IKM Rendang Kota Payakumbuh	
22 Agustus 2023	Kunjungan dari BPK Pusat	
23 Agustus 2023	Diskusi Bersama Koperasi Sentra Rendang Payo	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
14 September 2023	Kunjungan dari DPRD Rengat	30
27 September 2023	Kunjungan dari LOKA POM Kota Payakumbuh	

Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
04 Oktober 2023	SCHOOL OF RANDANG TK Istiqamah Kota Payakumbuh	200
12 Oktober 2023	Kunjungan Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Negeri Riau tentang SCHOOL OF RANDANG	
13 Oktober 2023	Kunjungan dari IKM Rendang Gadih	
13 Oktober 2023	Kunjungan dari IKM Rendang	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
07 November 2023	SCHOOL OF RANDANG Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kota Padang	600
08 November 2023	SCHOOL OF RANDANG SMA-IT Al-Itthad Kota Pekanbaru	
08 November 2023	Kunjungan BBPOM Kota Medan	
22 November 2023	SCHOOL OF RANDANG SMK 2 Lubuak Basung	
27 November 2023	Kunjungan Pertukaran Mahasiswa- Mahasiswi Merdeka (PNM)	
Tanggal	Kegiatan	Jumlah (Orang)
01 Desember 2023	Kunjungan dari UKM Natuna Riau	100
19 Desember 2023	Kunjungan BPOM Denpasar	
22 Desember 2023	Kunjungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tanjung Pinang	
Total		2.124

- f. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Kegiatan pelatihan batik cap, yang dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 27 September 2023 dengan peserta 15 orang, yang bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Pelatihan Batik Cap



- Gallery Kriya Dekranasda di Mall Pelayanan Kota Payakumbuh



- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

- a) Pelatihan Perizinan Berusaha Sektor Industri (NIB dan Sertifikasi)

Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi kebijakan di banyak sektor termasuk perizinan. Saat ini, kebijakan perizinan berusaha yang berlaku adalah Perizinan Berusaha Terintegrasi dan Berbasis Resiko. Setiap Pelaku Usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB RBA) dan berkomitmen untuk memenuhi perizinan lainnya seperti Perizinan Dasar seperti izin lingkungan dan Keterangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang serta Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU). Selain itu, sebagai pelaku usaha di bidang industri, IKM juga harus memiliki sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU Jaminan Produk Halal.

Pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari tanggal 6-9 Februari 2023 bertempat di Aula Sentra Rendang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan jumlah peserta sebanyak 18 Orang dengan menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Kota Payakumbuh, Dinas PUPR Kota Payakumbuh, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPM) LPPOM MUI Sumbar.

Berikut Daftar Peserta Pelatihan Perizinan Berusaha Sektor Industri (NIB dan Sertifikasi Halal) :

No	Nama Pelatihan / Peserta	Nama IKM	Jenis Industri	Alamat
1	Anita Roza	Roza Kitchen	Makanan Ringan	Padang Tengah Balai Nan Duo
2	Santania Anggreka	San Food	Makanan Ringan	Tigo Koto Diate
3	Sustri Rahayu N	Mama Uthie	Makanan Ringan	Tigo Koto Diate
4	Mona Anggela	Naa-Kitchen	Makanan Ringan	Parak Batuang

No	Nama Pelatihan / Peserta	Nama IKM	Jenis Industri	Alamat
5	Emiyarnis	Rendang Telur YR	Rendang	Padang Tinggi Piliang
6	Azizah Hukma S	Midola	Makanan Ringan	Padang Tinggi Piliang
7	Metra Putri Yani	Naza	Makanan Ringan	Koto Panjang Padang
8	Elvita Mardiyah Hayati	Sanjai Andini	Makanan Ringan	Bulakan Balai Kandi
9	Riza Budiarni	Pisang Linting	Makanan Ringan	Payolansek
10	Aryfadillah	Loyang Misha	Roti dan Kue	Tigo Koto Diate
11	Dona Eka Putri	Legend	Makanan Ringan	Koto Kociak Kubu Tapakrajo
12	Fernande Lubis	Sanjai Nayla	Makanan Ringan	Payolansek
13	Thamsil Hidayat	Mom's Crispy	Makanan Ringan	Tigo Koto Diate
14	Mutia Permata Devi	Gelamai dan Beras Rendang DBK	Makanan Ringan	Kubu Gadang
15	Maifiza	Fiza Cake	Roti dan Kue	
16	Hanafi Rusianda	Fianda Coffee	Kopi	Ibuh
17	Robi Erwin	Sanjai OL	Makanan Ringan	Sicincin
18	Nur Fadilah	Uwaia	Makanan Ringan	Ikua Koto Dibalai

Pelatihan Perizinan Berusaha Sektor Industri Tahun 2023

P



3) Fasilitasi Sertifikasi Halal

Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi IKM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan Swakelola Tipe III, dimana Swakelola direncanakan dan diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selaku Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola yang ditunjuk yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat untuk Sertifikasi Halal Mekanisme Reguler dan Halal Center Cendekia Muslim untuk Mekanisme Self Declare.

Berikut Detail dari Sertifikat Halal Mekanisme Reguler :

No	Nama IKM	Nomor Sertifikat	Jenis Produk	Diterbitkan
1	Dapoer Rendang Riry	ID131100067 14640523	Daging dan Produk Olahan Daging	19 Juli 2023
2	Rendang Erika	ID131100102 94150723	Daging dan Produk Olahan Daging	27 Juli 2023
3	Resha Catering	ID131100069 44440723	Daging dan Produk Olahan Daging	27 Juli 2023
4	Rendang Nikmat Dia	ID131100070 99390723	Daging dan Produk Olahan Daging	27 Juli 2023
5	Dapur Wosugi	ID131100067 14411022	Daging dan Produk Olahan Daging	19 Juli 2023
6	Rendang Yolanda	ID131100074 42570723	Daging dan Produk Olahan Daging	27 Juli 2023
7	Rendang Usmai	ID131100116 91880723	Daging dan Produk Olahan Daging	27 Juli 2023
8	UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang	ID134100074 42580723	Jasa Pengolahan	27 Juli 2023
9	Tijarah	ID131100067 14550523	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	19 Juli 2023
10	Bunda Pat	ID131100067 14630623	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	19 Juli 2023

Berikut Detail dari Sertifikat Halal Mekanisme Self Declare :

No	Nama IKM	Nomor Sertifikat	Jenis Produk	Masa Berlaku Sertifikat
1	Dapoer Rendang Riry	ID131100026 29840523	Telur olahan dan produk- produk telur hasil olahan	18 Mei 2023
2	Dapoer Rendang Riry	ID131100026 29850523	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan	18 Mei 2023

No	Nama IKM	Nomor Sertifikat	Jenis Produk	Masa Berlaku Sertifikat
			bahan tambahan pangan	
3	Karitiang Kopi	ID131100105 61690823	Penyediaan makanan dan minuman dengan Pengolahan	24 Oktober 2023
4	Rendang Erika	ID131100026 28620423	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	18 Mei 2023
5	Rendang Sulaiman	ID131100026 28560423	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	18 Mei 2023
6	Usaha Karak Kaliang Arif 5 Saudara	ID131100079 19470823	Serealialia dan produk serealialia yang merupakan produk turunan dari biji serealialia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	6 September 2023
7	Nusambal	ID131100101 84730723	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	18 Oktober 2023
8	Ibu Aimalby	ID131100083 81460823	Makanan ringan siap santap	18 September 2023
9	Karak Kaliang Martin	ID131100076 23880723	Makanan ringan siap santap	28 Agustus 2023

No	Nama IKM	Nomor Sertifikat	Jenis Produk	Masa Berlaku Sertifikat
10	Naraya Chocolate	ID131100079 19480823	Kembang gula/permen dan cokelat	6 September 2023
11	Dapur Wosugi	ID131100135 68911123	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	29 Desember 2023
12	Loyang Misha	ID131100096 98810723	Produk bakeri	10 Oktober 2023
13	CV. Alvin Utama Jaya	ID131100123 63671023	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	1 Desember 2023
14	Rendang Amak	ID131100123 63691023	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	1 Desember 2023
15	Tiara's Kitchen	ID131100043 06260523	Makanan ringan siap santap	22 Juni 2023
16	Tiara's Kitchen	ID131100043 06260523	Makanan ringan siap santap	22 Juni 2023
17	Rendang Pusako Bundo	ID131100034 73760423	Garam, rempah,sup, saus, salad, serta produk protein	7 Juni 2023
18	Rendang Usmai	ID131100101 29410723	Buah dan sayur dengan pengolahan	17 Oktober 2023

No	Nama IKM	Nomor Sertifikat	Jenis Produk	Masa Berlaku Sertifikat
			dan penambahan bahan tambahan pangan	
19	Rendang Usmai	ID131100102 37450723	Serealialia dan produk serealialia yang merupakan produk turunan dari biji serealialia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	19 Oktober 2023
20	Rahmad Chaniago	ID131100026 29870523	Makanan ringan siap santap	18 Mei 2023
21	Gembira	ID131100092 04640723	Produk bakeri	1 Oktober 2023
22	Gembira	ID131100026 28630423	Makanan ringan siap santap	18 Mei 2023
23	Roza's Kitchen	ID131100022 43760423	Produk bakeri	10 Mei 2023
24	Sanfood	ID131100022 43730423	Makanan ringan siap santap	10 Mei 2023
25	Mama Uthie	ID131100026 28520423	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska,krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	18 Mei 2023
26	Naa-Kitchen	ID131100026	Produk bakeri	18 Mei 2023

No	Nama IKM	Nomor Sertifikat	Jenis Produk	Masa Berlaku Sertifikat
		28600423		
27	Snack YR	ID131100026 28540423	Telur olahan dan produk- produk telur hasil olahan	18 Mei 2023
28	Snack YR	ID131100026 28530423	Makanan ringan siap santap	18 Mei 2023
29	Gembira	ID131100026 28630423	Makanan ringan siap santap	18 Mei 2023
30	Usaha Alke	ID131100116 33591023	Penyediaan makanan dan minuman dengan Pengolahan	15 November 2023
31	Bunda Snack	ID131100103 37840923	Penyediaan makanan dan minuman dengan Pengolahan	20 Oktober 2023
32	Akademios Crispy	ID131100123 63641123	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk Protein	1 Desember 2023
33	Arsya	ID131100131 31571223	Makanan ringan siap santap	18 Desember 2023
34	Loyang Misha	ID131100096 98810723	Produk bakeri	10 Oktober 2023
35	Lambung Snack Alya	ID131100117 89690823	Serealiala dan produk serealiala yang merupakan produk turunan dari biji serealiala, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan	18 November 2023

No	Nama IKM	Nomor Sertifikat	Jenis Produk	Masa Berlaku Sertifikat
			pangan	
36	Sanjai Nayla	ID131100022 47240423	Makanan ringan siap santap	10 Mei 2023
37	Maifiza	ID131100129 15451023	Produk bakeri	14 Desember 2023
38	Anda	ID131100129 15471123	Makanan ringan siap santap	14 Desember 2023
39	Usaha Tri Utami	ID131100131 97461023	Produk bakeri	21 Desember 2023
40	Usaha Alke	ID131100116 33591023	Penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan	15 November 2023
41	Rendang Yolanda	ID131100122 16601023	Makanan ringan siap santap	28 November 2023
42	Syaira			
43	Erina	ID131100123 63561123	Makanan ringan siap santap	1 Desember 2023
44	Yunikha Kitchen	ID131100123 63281123	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	1 Desember 2023
45	Rakik Kacang Awan 07	ID131100026 29750523	Produk bakeri	18 Mei 2023
46	Yunikha Kitchen	ID131100127 48911123	Makanan ringan siap santap	10 Desember 2023
47	Yunikha Kitchen	ID131100129 15461123	Produk bakeri	14 Desember 2023

4) Pelatihan Keamanan Pangan (CPPOB dan HACCP)

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung proses audit HACCP Koperasi Sentra Rendang Payo dan UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang

Payakumbuh guna meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan kebijakan keamanan pangan khususnya prinsip-prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP). Pelatihan ini dilaksanakan di Aula Sentra Rendang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada tanggal 3-4 Mei 2023 dengan peserta sebanyak 10 orang. Narasumber pelatihan ini berasal dari Loka POM Payakumbuh.

Peserta pelatihan ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Nama IKM / Instansi	Alamat
1	Wike Rahfani	Koperasi Sentra Rendang Payo	Tigo Koto Diate
2	Yoga Pratama	Koperasi Sentra Rendang Payo	Tanjung Pauh
3	Ira Zahar	Koperasi Sentra Rendang Payo	Kapalo Koto Dibalai
4	Novit Ardy	UPTD P3R	Padangtengah Payobadar
5	Hariandy Al Fuaddi	UPTD P3R	Tigo Koto Diate
6	Andre Febriandi	UPTD P3R	Tanjung Pauh
7	Titin Risti Atmala Sari	Koperasi Sentra Rendang Payo	Tiakar
8	Rendy Rozeno	UPTD P3R	
9	Erillia Bonita Yos	Koperasi Sentra Rendang Payo	Payobasung
10	Jimi Permana	UPTD P3R	Kapalo Koto Ampangan

Pelatihan Keamanan Pangan (CPPOB dan HACCP) 2023



5) Fasilitasi Sertifikasi HACCP

Sertifikasi HACCP atas nama Koperasi Sentra Rendang Payo sudah memasuki masa kadaluarsa dan telah berakhir pada Oktober 2022. Untuk itu, dibutuhkan resertifikasi. Kegiatan ini memberikan fasilitasi kepada Koperasi Sentra Rendang Payo yang saat ini membutuhkan sertifikat tersebut untuk mengakses peluang pemasaran rendang ke luar negeri.

Dalam pelaksanaan sertifikasi HACCP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh bekerja sama dengan PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo). Sucofindo merupakan perusahaan terkemuka dibidang sertifikasi dan standardisasi.

Audit dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 12-13 April 2023 bertempat di Sentra IKM Rendang Payakumbuh dan menghasilkan temuan minor sebanyak 7 buah dan observasi sebanyak 1 buah. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Koperasi Sentra Rendang Payo dan dapat diterima oleh auditor sehingga Koperasi direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat HACCP.

Audit HACCP Koperasi Sentra Rendang Payo



Sertifikat HACCP Koperasi Sentra Rendang Payo



6) Verifikasi/Pengawasan Perizinan

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap IKM, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melaksanakan pengawasan dan verifikasi terhadap IKM yang telah mengurus dan/atau sedang mengurus perizinan berusaha. IKM dalam mengurus perizinan berusaha mengakses melalui akun oss.go.id dan akun SIINas. Rata-rata Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kota Payakumbuh memiliki tingkat resiko rendah, jadi perizinan cukup dengan NIB yang diakses melalui NIB dengan catatan pemenuhan komitmen terhadap perizinan

dasar seperti SPPL dan KKPR terpenuhi. Sementara itu, bagi IKM yang memiliki resiko menengah tinggi dan tinggi selain wajib memiliki akun oss juga harus memiliki akun SIINas.

Dinas melakukan verifikasi dan pengawasan langsung ke lapangan untuk melihat fasilitas produksi dan penerapan SOP.

Verifikasi dan Pengawasan Lapangan ke CV. Mutiara Alam Lestari



7) Rendang Goes To The World

Dalam rangka percepatan pemasaran rendang menuju pasar global, Walikota Payakumbuh membentuk Tim Percepatan Rendang Goes To The World yang berisikan pejabat terkait dari internal pemerintah Kota Payakumbuh dan tenaga ahli/akademisi dari eksternal Pemko Payakumbuh yaitu dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatera Barat.

Tim ini bertugas sebagai *think thank* yang menjalankan fungsi manajemen guna mengantarkan rending payakumbuh menuju pasar global. Mulai dari merumuskan Rencana Aksi, mengimplementasikannya, dan melakukan evaluasi serta monitoring.

Pada tahun 2023, Tim ini melanjutkan pekerjaannya dengan menghasilkan penawaran yang berisikan Rencana

Anggaran Belanja (RAB) pengiriman bumbu rendang termasuk tenaga SDM untuk alih pengetahuan. RAB ini ditawarkan kepada Pihak Bulgaria melalui bantuan dari Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Bapak Iwan Bogananta.

Rapat Tim Percepatan Rendang Goes To The World







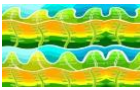

8) Lomba Desain Motif Batik Payakumbuh

Dalam rangka pengenalan batik kepada masyarakat Payakumbuh sekaligus memantapkan motif Payakumbuh guna melelengkapi motif-motif yang sudah ada sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melaksanakan Lomba Desain Motif Batik Payakumbuh.

Langkah pertama, Dinas menyusun pengumuman disertai dengan petunjuk teknis kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat melalui saluran media yang ada. Peserta yang mendaftar sebanyak 21 orang dengan jumlah desain motif yang disampaikan sebanyak 28 desain. Penilaian dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap awal; untuk menentukan 10 besar desain motif terbaik dan tahap akhir; untuk menentukan pemenang lomba dari juara 1 sampai harapan 3. Juri yang terlibat dalam penilaian lomba ini ada 3 orang yaitu Ny. Lasta Jasman (Ketua Dekranasda Kota Payakumbuh), Ibu Widdyanti, S.Sn, M.Sn (Doses ISI

Padang Panjang), dan Bapak Sani Bismar (Pelaku Industri Batik/ Owner Rumah Batik Putiandam).

Berikut daftar pemenang beserta desainnya Lomba Desain Motif Batik Payakumbuh Tahun 2023 :

Nama	Desain	Total Nilai	Peringkat
Davit Eko Kris Cahyono		285	Juara 1
Tri Yosna Yunus		284	Juara 2
Suci Arma Wahyu Nasution		281	Juara 3
Maryeni		277	Harapan 1
Muhammad Farhan Fadillah		273	Harapan 2
Hidayat Maulana		262	Harapan 3

9) Fasilitasi ISO 22000

ISO 22000 merupakan sertifikasi yang menunjukkan standar dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang berlaku Internasional dan menjadi salah satu syarat yang sering diminta apabila pelaku industri mengirimkan produknya ke luar negeri. Koperasi Sentra Rendang Payo telah memiliki sertifikat ini, namun pada tahun oktober 2023 berakhir. Untuk itu, perlu dilakukan resertifikasi. Mengingat Koperasi Sentra Rendang Payo belum sepenuhnya mandiri dan lembaga ini menjadi kelompok usaha yang menggerakkan Sentra IKM Rendang Payakumbuh, maka perlu dilakukan intervensi melalui pemberian fasilitasi sertifikasi ISO 22000.

Dalam pelaksanaan sertifikasi, Dinas bekerjasama dengan PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) lembaga sertifikasi yang kredibel dan berpengalaman. Sama

halnya seperti sertifikasi HACCP, audit ISO 22000 dilaksanakan sebanyak 2 tahap yaitu stage 1 dan stage 2. Audit dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 7-9 Desember 2023, yang terdiri dari jenis audit yaitu stage 1, audit pendahuluan terkait kelembagaan koperasi dan aktivitas bisnis yang dimiliki dan audit stage 2 meliputi audit verifikasi dokumen, rekaman, dan tinjauan/observasi lapangan pada hari pertama dan *Site Verification* pada hari kedua.

Koperasi Sentra Rendang Payo setelah dilaksanakan audit mendapatkan temuan sebanyak 16 item yang terdiri dari 14 temuan minor dan 2 observasi. Semua temuan telah ditindaklanjuti dan Sucofindo dapat memberikan rekomendasi untuk memberikan sertifikat ISO 22000 dalam laporan audit nya.

Audit Sertifikasi ISO 22000 a.n. Koperasi Sentra Rendang Payo Tahun 2023



10) Payakumbuh Fashion Carnival

Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Payakumbuh sekaligus mempromosikan salah satu wastra Kota Payakumbuh yaitu Tenun Balai Panjang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh bekerja sama dengan Dekranasda Kota Payakumbuh menyelenggarakan

Event “Payakumbuh Fashion Carnival” dengan Tema “Identitas Organisasi dalam Balutan Kain Tenun Balai Panjang”.

Peserta diwajibkan menggunakan bahan kain tenun balai panjang dan bisa dipadukan dengan bahan lainnya pada kostum Carnival yang ditampilkan. Desain kostum *Fashion Carnival* yang ditampilkan oleh peserta memiliki tema khusus yang mengacu kepada tema event *Payakumbuh Fashion Carnival* Tahun 2023 dan dituangkan dalam bentuk sinopsis.

Kegiatan dilaksanakan di Kawasan Pasar Payakumbuh, pada tanggal 14 Desember 2023 Jam 13.00 WIB. Lokasi panggung utama berada di depan Kantor Pos Payakumbuh. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari 35 peserta kategori OPD / UPT / Perumda dan 4 peserta kategori umum. Peserta kedua kategori ini dinilai oleh dewan juri yang memiliki kompetensi dan bersifat independen yaitu Ny. Lasta Jasman (Ketua Dekranasda Kota Payakumbuh), Desra Imelda, S.Pd., M.Sn (Ketua prodi desain mode ISI Padang Panjang), dan Bevi Fenti Okma (Fashion Desainer).

Berikut daftar pemenang hasil Payakumbuh Fashion Carnival di dua kategori yaitu :

Kategori	Peringkat	Nama Peserta/Instansi/Organisasi
OPD / UPT / Perumda	Juara 1	Dinas Pendidikan Jenjang SMP
	Juara 2	Satpol PP Damkar
	Juara 3	Perumda Air Minum Tirta Sago
	Harapan 1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Harapan 2	Dinas Kesehatan
	Harapan 3	Dinas Lingkungan Hidup
Umum	Juara 1	PT. PLN UP3 Payakumbuh
	Juara 2	Lindang Urek
	Juara 3	SMK 3 Payakumbuh
	Harapan 1	BPJS Kesehatan

Penampilan peserta Payakumbuh Fashion Carnival Tahun 2023



Anggaran pendukung untuk indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi sebesar Rp. 1.768.934.759,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.634.839.083,- atau sebesar 92,42%.

2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Tahun 2021 -2023 :

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	2.50%	15,32%	3,00%	3,1%	3,00%	5,63%

Capaian sasaran strategis kedua Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, persentase peningkatan nilai produksi Tahun 2023 mengalami kenaikan di tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan nilai produksi industri di Kota Payakumbuh melebihi target yaitu 5,63%. Kondisi ini dipicu oleh terjadinya penambahan IKM menyebabkan peningkatan dalam nilai produksi. Sebagai gambaran di tahun 2022 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 2.000 unit usaha, akan tetapi tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.454 unit usaha, meningkat lebih kurang 454 IKM. Dengan tajamnya peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	% Capaian
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,25%	3,25%	100%

Tahun 2023 merupakan tahun ke 1 implementasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah Persentase Peningkatan Nilai Produksi sebesar 5,63%, yang berarti melampaui target capaian akhir Renstra sebesar 3,00%, atau memiliki persentase capaian 187,67%.

2.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibandingkan dengan standar nasional dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target/Standar Nasional
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	5,63%	5,04%

Sasaran strategis 2 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Produksi realisasi capaian sebesar 5,63% sudah mencapai target nasional, yang target/standar nasional sebesar 5,04%.

2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Ketersediaan Anggaran Pemerintah (APBD Kota Payakumbuh, APBD Propinsi, dan APBN);
2. Kondisi ekonomi yang sudah normal;
3. Distribusi bahan baku dan pengiriman produk yang lebih lancar;
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan;
5. Ketersediaan bahan baku yang mencukupi;

6. Partisipasi aktif Kementerian/Lembaga/Instansi memfasilitasi IKM dalam melakukan pengurusan sertifikasi mutu produk;
7. Ketersediaan dukungan teknologi tepat guna;
8. Peluang pasar produk industri yang sudah mulai terbuka baik pasar domestik maupun internasional;
9. Meningkatnya pemanfaatan e-commerce oleh pelaku IKM;
10. Mulai tumbuhnya wirausahawan baru.

Faktor Penghambat :

1. Kenaikan harga BBM Bersubsidi dan Inflasi;
2. Kualitas SDM Pelaku IKM yang umumnya masih rendah;
3. Belum optimalnya sinergisitas antar Perangkat Daerah;
4. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan produksi yang mengacu kepada prinsip prinsip produksi yang baik oleh IKM;
5. Masih rendahnya kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi mutu produk;
6. Anggaran yang tersedia belum optimal dalam mendukung peningkatan kapasitas IKM dan Kualitas produk yang dihasilkan;
7. Ketersediaan jumlah tenaga ahli dan tenaga fungsional Pembina IKM yang masih kurang;
8. Belum optimalnya IKM dalam memanfaatkan peluang pasar yang tersedia;
9. Masih minimnya inovasi dan kreatifitas IKM dalam pengembangan produk;
10. Belum optimalnya pengelolaan Sentra-Sentra IKM yang ada;
11. Masih minimnya kolaborasi antar IKM, IKM dengan Industri Besar, dan IKM dengan stakeholder terkait.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Stabilitas ekonomi dan angka inflasi;
2. Implementasi program dan kegiatan yang berkesinambungan;

3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor;
4. Ketersediaan anggaran yang memadai;
5. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;
6. Meningkatkan pembinaan terhadap IKM secara komprehensif;
7. Meningkatkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh IKM;
8. Menghubungkan IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya;
9. Meningkatkan pemasaran produk IKM melalui optimalisasi pemasaran online, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pembangunan jejaring dengan stakeholder terkait baik di dalam maupun luar negeri;
10. Optimalisasi pengelolaan sentra-sentra IKM.

Tabel 3.14
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%	5,63%	187,67%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan nilai produksi pelaku usaha/IKM melalui TTG dan diservikasi produk - Memfasiliatsi dalam pengurusan sertifikat halal bagi IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas ekonomi dan angka inflasi 2. Implementasi program dan kegiatan yang berkesinambungan 3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor 4. Ketersediaan anggaran yang memadai 5. Meningkatkan pembinaan terhadap IKM secara komprehensif 6. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh IKM 7. Menghubungkan IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya 8. Meningkatkan pemasaran produk IKM melalui optimalisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
							pemasaran online, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pembangunan jejaring dengan stakeholder terkait baik di dalam maupun luar negeri 9. Optimalisasi pengelolaan sentra-sentra IKM

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri mempunyai 1 indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan nilai produksi dengan tingkat capaian rata-rata lebih dari 100%.

Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis dikarenakan program pemulihan ekonomi daerah, dimana salah satu kegiatan adalah dengan memberikan pelatihan bagi IKM terkait dalam perkembangan teknologi tepat guna, diversifikasi produk TTG yang bertujuan menjadikan IKM sebagai target konsumen dalam persaingan pasar dan meningkatkan peran IKM dalam menunjang produktifitas IKM Kota Payakumbuh.

2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.15
 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri				1.768.934.759	1.634.839.083	92,42%	7,58
	Persentase peningkatan nilai produksi	3,00%	5,63%	187,67%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri pada Tahun 2023, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Sangat Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 7,58% dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 92,42%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dengan hasil tingkat capaian lebih dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 20 orang yang terdiri dari : 5 ASN, 2 P3K dan 13 TJP.

2.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 2, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.16

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase peningkatan nilai produksi	5,63%				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	15,52%	Menunjang
					- Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	125%	
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100%	Menunjang
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	305,55%	Menunjang
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	100%	Menunjang

Adapun perkembangan usaha industri di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Data Perkembangan Usaha Industri Kota Payakumbuh
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Unit Usaha	Unit	1,783	1,853	1,902	1,928	2,000	2,454
2	Formal	Unit	225	583	630	643	905	1,359
3	Non Formal	Unit	1,558	1,270	1,272	1,285	1,095	1,095
4	Tenaga Kerja	Orang	5,854	6,106	6,271	6,308	6,485	7,549
5	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	86,742,512	88,040,791	95,649,716	95,954,716	87,291,446	94,866,073
6	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	337,720,000	342,785,800	257,089,350	296,463,459	269,426,788	284,598,221

1. Pada Tahun 2023 Jumlah IKM meningkat dari 2000 menjadi 2.454. Terjadi Peningkatan sebesar 22,7%. Hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid sudah berakhir dan inflasi tetap terjaga membuat kondisi ekonomi cukup baik sehingga memunculkan IKM baru untuk tumbuh. Selain itu, program WUB dari Pemprov Sumbar juga mendukung pertumbuhan IKM.
2. Penambahan IKM sebanyak 454 unit usaha hanya terjadi di sektor industri formal saja. Pada tahun 2022 tercatat 905 unit usaha industri formal (industri yang memiliki perizinan) menjadi 1.359 unit usaha pada tahun 2023, meningkat sebanyak 454 IKM (50,17%).
3. Untuk IKM sektor Non Formal jumlahnya tetap yaitu sebanyak 1.095. Penambahan IKM merupakan wirausaha baru yang mendaftarkan usahanya melalui OSS untuk mendapatkan NIB RBA.
4. Dengan meningkatnya jumlah unit usaha industri di Kota Payakumbuh yang sebelumnya 2000 menjadi 2.454 unit usaha, secara tidak langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.549. Meningkat sebesar 16,41% dari tahun sebelumnya.
5. Dengan bertambahnya IKM memicu peningkatan Nilai Investasi dan Nilai Produksi. Selain itu, pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah juga cukup memberikan pengaruh positif terhadap kedua nilai tersebut. Inflasi tahun 2023 sebesar 2,61%, lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi 2022 yang mencapai 5,51%. Dengan inflasi

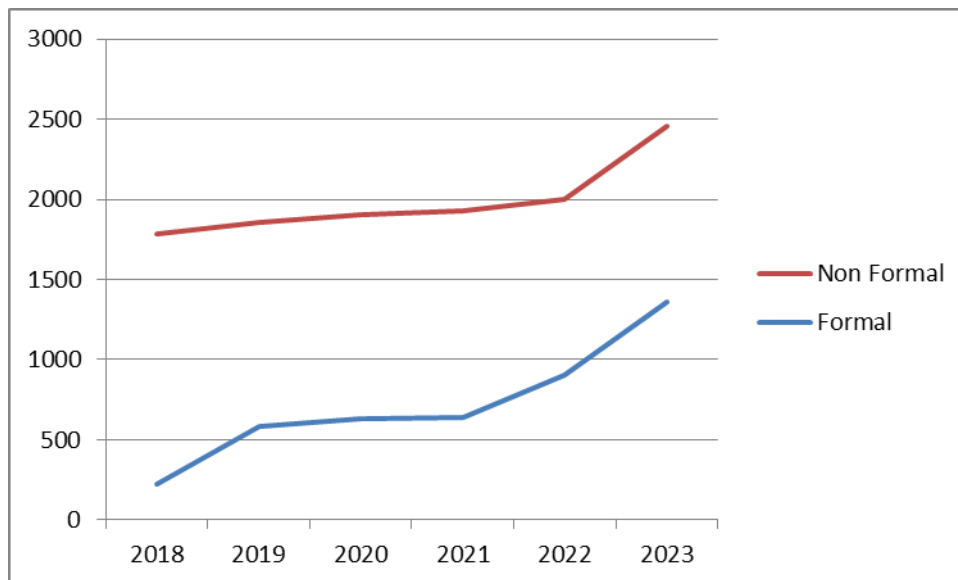
yang terjaga, IKM bisa menggenjot produksi karena harga bahan baku relatif terjangkau sehingga HPP bisa kompetitif.

Demikian juga industri kecil formal dapat berkembang menjadi industri menengah dan besar formal. Dengan dimilikinya legalitas usaha, serta makin meningkatnya kualitas dan kuantitas produk maka diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri.

Tabel 3.18
Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Formal	unit	225	583	630	643	905	1,359
2	Non Formal	unit	1,558	1,270	1,272	1,285	1,095	1,095

Grafik 3.2
Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha



Sektor industri bagi suatu daerah merupakan sektor yang menimbulkan perkembangan jauh lebih pesat untuk pertumbuhan ekonomi. Analisis teoritis dan penyelidikan empiris telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi merupakan penentu utama dari lajunya pertumbuhan ekonomi. Tanpa sektor industri, daerah yang mulai berkembang akan mengalami pertumbuhan lebih lambat dari pada

yang telah dicapainya pada tahun-tahun lalu. Oleh karena itu, sektor industri menjadi tumpuan harapan bagi pembangunan suatu daerah.

Kota Payakumbuh memiliki 2.454 unit Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari berbagai macam jenis Industri. Seperti industri kerajinan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bangunan, industri logam mesin dan elektronika dan industri pangan. Dimana industri yang paling banyak di Kota Payakumbuh yaitu Industri makanan seperti industri Rendang, gelamai, keripik sanjai, dan sebagainya.

Kota Payakumbuh merupakan kota penghubung antara Kota Padang dengan Kota Pekanbaru, dari Kota Payakumbuh dapat juga terhubung ke jalur lintas tengah Sumatera tanpa mesti melewati Kota Bukittinggi. Dan juga merupakan sebagai Kota persinggahan.

Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100%	Sangat Baik

Pada Sasaran 3 ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

Didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi 100%.

Anggaran pendukung untuk indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat sebesar Rp. 3.463.866.791,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.962.755.560,- atau sebesar 85,53%.

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021 - 2023 :

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Capaian sasaran strategis ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat Tahun 2023 mendapat nilai A.

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	% Capaian
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100%

Tahun 2023 merupakan tahun ke 1 implementasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat dengan nilai A, yang berarti target capaian akhir Renstra dengan nilai A tercapai, atau memiliki persentase capaian 100%.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibandingkan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis 3 Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target/Standar Nasional
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga	A	B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target/Standar Nasional
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat		

Sasaran strategis 3 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat realisasi capaian dengan nilai A sudah mencapai target nasional, yang target/standar nasional nilai B.

3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.23
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian				3.463.866.791	2.962.755.560	85,53%	14,47
	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun 2023, maka dalam konteks efisiensi

penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 14,47% dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 85,53%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan hasil tingkat capaian dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 11 orang yang terdiri dari : 7 ASN dan 4 TJP.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 3, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.24
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	100				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	109,82%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
					Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	100%	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa/Sarana Penunjang Operasional Kantor	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	100%	Menunjang

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini, dengan nilai A, dengan mengoptimalkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan sumber pendanaan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Kalau kita lihat dari segi dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), bila dilihat dari segi kuantitas masih kurang mendukung dalam

pencapaian target Sasaran Strategis ini, oleh karena itu kami terus berupaya memaksimalkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu SDM, selanjutnya dari segi kuantitas maupun kualitas dukungan SDM. Untuk itu kita juga berupaya dengan melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam hal ini Sekretariat yang ada dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, agar menambahkan jumlah personil untuk mendukung pencapaian sasaran ini.

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh alokasi anggaran APBD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebesar Rp. 5.873.597.770,- terealisasi sebesar Rp. 5.201.983.010,- atau 88,57%.

Pagu anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Payakumbuh. Gambaran Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	59.992.776,-	54.923.171,-	91,55
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	59.992.776,-	54.923.171,-	91,55
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	54.345.976,-	50.208.471,-	92,39
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	5.647.800,-	4.714.700,-	83,48
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	440.189.118,-	421.169.864,-	95,68
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	440.189.118,-	421.169.864,-	95,68
		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	440.189.118,-	421.169.864,-	95,68

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	112.996.026,-	105.326.682,-	93,21
		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	27.447.880,-	27.097.640,-	98,72
		Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	27.447.880,-	27.097.640,-	98,72
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	85.548.146,-	78.229.042,-	91,44
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	85.548.146,-	78.229.042,-	91,44
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	27.617.300,-	22.968.650,-	83,17
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	27.617.300,-	22.968.650,-	83,17
		Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.538.150,-	19.638.500,-	83,43
		Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.079.150,-	3.330.150,-	81,64
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.411.096.619,-	1.339.262.304,-	94,91
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.411.096.619,-	1.339.262.304,-	94,91
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	174.593.340,-	132.186.300,-	75,71
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	555.687.870,-	539.061.201,-	97,01
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	31.108.120,-	30.031.528,-	96,54
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	507.653.731,-	497.026.542,-	97,91

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	142.053.558,-	140.956.733,-	99,23
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	357.838.140,-	295.576.779,-	82,60
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	357.838.140,-	295.576.779,-	82,60
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	357.838.140,-	295.576.779,-	82,60
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.463.866.791,-	2.962.755.560,-	85,53
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.021.990,-	122.201.710,-	96,97
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.917.040,-	17.423.620,-	97,25
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.998.950,-	16.894.190,-	93,86
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.106.000,-	87.883.900,-	97,53
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.613.223.105,-	2.148.559.895,-	82,22
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.436.371.905,-	1.975.008.695,-	81,06
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.851.200,-	173.551.200,-	98,13
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.600.000,-	12.600.000,-	100
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.600.000,-	12.600.000,-	100
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.569.140,-	270.464.399,-	98,51

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.998.150,-	1.993.900,-	99,79
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.882.000,-	16.382.000,-	86,76
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.651.250,-	31.854.420,-	97,56
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.193.180,-	21.896.275,-	98,66
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.004.560,-	5.580.000,-	92,93
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.500.000,-	10.478.750,-	99,80
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.340.000,-	182.279.054,-	99,97
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.851.000,-	35.546.000,-	93,91
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.851.000,-	35.546.000,-	93,91
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.402.956,-	266.670.343,-	92,14
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.205.000,-	2.200.000,-	99,77
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.947.468,-	148.240.616,-	87,23
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.250.488,-	116.229.727,-	99,13
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.198.600,-	106.713.213,-	96,84
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,-	39.110.042,-	99,80
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.400.000,-	56.714.671,-	95,48
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5.638.600,-	5.233.600,-	92,82
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000,-	5.654.900,-	94,72

Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdiri dari 7 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dan dibagi menjadi 2 urusan yaitu :

1. **Urusan Wajib Tenaga Kerja**

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Wajib Tenaga Kerja terdapat 5 Program, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Dari 5 Program tersebut, 1 Program Sekretariat dan 4 Program Bidang Tenaga Kerja.

Sedangkan dari 28 Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Tenaga Kerja, terdiri dari 21 Sub Kegiatan Sekretariat dan 7 Sub Kegiatan Bidang Tenaga Kerja.

Pagu anggaran tersebut sumber dananya dari APBD Kota Payakumbuh. Dukungan dana untuk Urusan Wajib Tenaga Kerja sebesar Rp. 4.104.663.011,- sedangkan realisasi anggaran untuk Urusan Wajib Tenaga Kerja sebesar Rp. 3.567.143.927,- atau 86,90%.

Dari 28 Sub Kegiatan tersebut 22 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 90% dan 6 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 80%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dari Urusan Wajib Tenaga Kerja bila dilihat dari rata-rata penyerapan per kegiatan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2. **Urusan Pilihan Perindustrian**

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Pilihan Perindustrian terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.768.934.759,-. Pagu anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Payakumbuh. Realisasi anggaran untuk Urusan Pilihan Perindustrian sebesar Rp.1.634.839.083,- atau 92,42%.

Dari 6 Sub Kegiatan tersebut diatas, 4 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 90%, 1 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 80% dan 1 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 75%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dari Urusan Pilihan Perindustrian bila dilihat dari rata-rata penyerapan per kegiatan termasuk dalam kategori Baik.

Tabel 3.26
Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	100%	12.500%
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	100%	12.500%
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 perusahaan	1 perusahaan	100%
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,92%	4,89%	124,74%
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 orang	80 orang	100%
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,35%	51,21%	110,49%
		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,35	51,21%	110,49%
		Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan	20 org	20 org	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
			Kesempatan Kerja			
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80 %	100%	125%
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 orang	289 orang	115,6%
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3,23%	3,23%	100%
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	75%	100%	133,33%
		Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 perkara	7 perkara	100%
		Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	3 perkara	100%
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	0,5%	500%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
			- Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	20%	50%	2.500%
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	83,33%	124,99%
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,40%	9,33%	388,75%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Industri Yang Difasilitasi	6 IKM	70 IKM	7.000%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	90	98,84	109,82%
			Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 laporan	11 laporan	100%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	88,57%	110,71%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang	21 orang	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	21 paket	21 paket	100%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional Kantor	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	6 paket	6 paket	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10 paket	10 paket	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	63 paket	63 paket	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	9 paket	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	10 laporan	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	25 laporan	100%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memakai barang milik daerah	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa/Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dan Sarana Prasarana Kantor Yang Dibayarkan	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	100%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang dipelihara	48 unit	48 unit	100%
		Sub Kegiatan	Jumlah peralatan	9 unit	9 unit	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dan mesin lainnya yang dipelihara			

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Wajib Tenaga Kerja terdapat 5 Program, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Anggaran dari program dan kegiatan tersebut sumber dananya berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Dari 28 Sub Kegiatan tersebut diatas semua Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 80%. Adapun Program yang ada pada Bidang Tenaga Kerja ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun
Indikator program ini menargetkan untuk penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja sebesar 0,8% dengan realisasi sebesar 100%, dengan nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 12.500%.

- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Indikator program ini menargetkan untuk persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 3,92%, realisasi sebesar 4,89%, dengan nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 124,74%.

- c. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator program ini menargetkan untuk persentase tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota, sebesar 46,35%, terealisasi sebesar 5,21%, maka nilai capaian Indikator

Kinerja Program sebesar 110,49%, hal ini disebabkan banyak penempatan tenaga kerja di Kota Payakumbuh.

- d. Program Hubungan Industrial dengan Indikator Kinerja Program :
- ✚ Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Indikator program ini menargetkan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 3,25%, terealisasi sebesar 3,25%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 100%, hal ini disebabkan kasus yang masuk 4 kasus.

2. Urusan Pilihan Perindustrian

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Pilihan Perindustrian terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Anggaran dari program dan kegiatan tersebut sumber dananya berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Dari 5 Sub Kegiatan tersebut 4 Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 90%, 1 Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 80% dan 1 Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 75%.

Adapun Program yang ada pada Bidang Tenaga kerja ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator Kinerja Program :

- ✚ Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna

- ✚ Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata

Indikator program ini menargetkan untuk persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna sebesar 0,10% dengan realisasi sebesar 0,5% dengan nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 500%. Sedangkan untuk persentase sentra/klaster industri yang tertata sebesar 20% dengan realisasi sebesar 50%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 2.500%.

- g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk

Indikator program ini menargetkan untuk persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk sebesar 2,40%, dengan realisasi sebesar 9,33%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 388,75%.

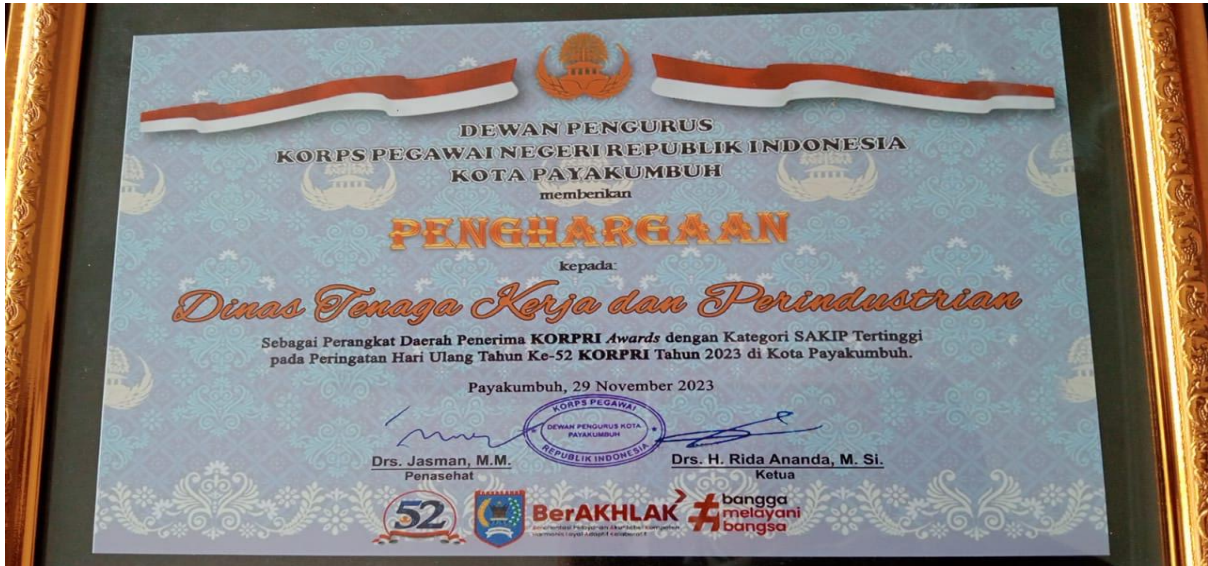
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dalam rangka penegakan disiplin pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah melakukan pembinaan untuk pelanggaran secara berkala dan situasional diantaranya :

- 1) Evaluasi kehadiran setiap bulan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas
- 2) Peringatan/teguran secara lisan
- 3) Peringatan/teguran secara tertulis

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki pegawai. Untuk Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai.

1. Penghargaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai Perangkat Daerah Penerima KORPRI Awards dengan Kategori SAKIP Tertinggi Tahun 2023 di Kota Payakumbuh.



2. Penghargaan kepada ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai Aparatur Sipil Negara Penerima KORPRI Awards dengan Kategori ASN Disiplin Tahun 2023 di Kota Payakumbuh.



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 merupakan tahun ke satu dari Renstra Tahun 2023-2026. Hasil laporan dapat disimpulkan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai 3 sasaran Indikator Kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Berdasarkan rencana target yang sudah dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 jumlah 3 indikator sasaran telah dilaksanakan dengan hasil predikat sangat baik dengan tingkat ketercapaian ≤ 100 .

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 5.873.597.770,- realisasi anggaran mencapai Rp. 5.201.983.010,- atau 88,57%.

4.2. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada Tahun 2023 berkaitan dengan :

Urusan Ketenagakerjaan

- a) Kualitas pekerja yang relatif masih rendah, ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja;
- b) Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja, karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki;
- c) Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sektor informal/usuha rumahan;
- d) Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- e) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan;

- f) Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g) Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja;
- h) Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan.

Urusan Perindustrian

- a) Produktifitas IKM menurun akibat dampak covid-19 dan kenaikan harga BBM yang mempengaruhi menurunnya permintaan pasar atas produk IKM;
- b) Kualitas produksi kurang bersaing;
- c) Sistem manajemen yang kurang baik dalam mengelola usaha;
- d) Kenaikan harga BBM, sehingga bahan baku menjadi mahal dan langka yang berpengaruh pada produktifitas IKM;
- e) Belum berkembangnya packing/kemasan industri makanan;
- f) Kurang berkembangnya teknologi permesinan di dalam negeri yang mendukung produk IKM.

4.3 Tindak Lanjut

Langkah-langkah untuk meningkatkan perbaikan lebih lanjut dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

Urusan Tenaga Kerja

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dengan Upskilling dan Reskilling dan pemagangan;
2. Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui sistem informasi penempatan tenaga kerja Bursa Kerja Online melalui aplikasi elektronik untuk memperluas penempatan tenaga kerja;
4. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan;
5. Mengoptimalkan kegiatan padat karya untuk mengurangi pengangguran;
6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk;
8. Melakukan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja,

pengawasan norma keselamatan kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam dan luar negeri;

9. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan dan pemantauan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta norma kerja.

Urusan Perindustrian

1. Meningkatkan pemasaran produk unggulan;
2. Meningkatkan kualitas pengrajin IKM;
3. Meningkatkan pengembangan packing/kemasan industri makanan;
4. Meningkatkan sarana dan kualitas SDM IKM;
5. Meningkatkan jumlah pasar dalam kondisi baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi kinerja yang akan datang.

Payakumbuh, Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



MUDA FATWA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNIDA FATWA, Sos.M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **Drs. JASMAN, MM**
Jabatan : **Pj. Walikota Payakumbuh**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Drs. JASMAN, MM

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,75%
2.	Meningkatnya produksi industri pengolahan	Persentase peningkatan nilai produksi	3,00%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.463.866.791,-	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 59.993.776,-	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 440.189.118,-	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 112.996.026,-	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	Rp. 27.617.300,-	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.411.096.619,-	APBD
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 357.838.140,-	APBD
	TOTAL	Rp. 5.873.597.770,-	

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



Drs. JASMAN, MM

Payakumbuh, Oktober 2023
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN



YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONISA PUTRA, S.Sos**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **YUNIDA FATWA, Sos.M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai IKM	90
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selaras dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80%
		Persentase capaian realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.463.866.791,-	APBD
	TOTAL	Rp. 3.463.866.791,-	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,



YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2023
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI AFRIANTI, SE**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DONISA PUTRA, S.Sos**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

DEWI AFRIANTI, SE
NIP. 19741216 200701 2 020

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	80%
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase capaian kinerja Program/Kegiatan	80%

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN,



DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

Payakumbuh, Oktober 2023
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN



DEWI AFRIANTI, SE
NIP. 19741216 200701 2 020



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. ADRIATI**

Jabatan : **Fungsional Pengantar Kerja Sub Koordinator Pelatihan dan Tenaga Kerja**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. GESMALINDRA**

Jabatan : **Kepala Bidang Tenaga Kerja**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. GESMALINDRA

NIP. 19651009 199303 2 004

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

Dra. ADRIATI

NIP. 19670321 199203 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
SUB KOORDINATOR PELATIHAN DAN TENAGA KERJA
BIDANG TENAGA KERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya SDM Pencari Kerja	Persentase peningkatan pencari kerja yang dilatih	5 %

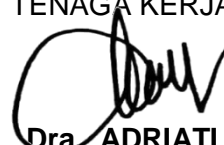
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 440.189.118,-	APBD
	TOTAL	Rp. 440.189.118,-	

KEPALA BIDANG TENAGA KERJA,



Ir. GESMALINDRA
NIP. 19651009 199303 2 004

Payakumbuh, Oktober 2023
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
SUB KOORDINATOR PELATIHAN DAN
TENAGA KERJA



Dra. ADRIATI
NIP. 19670321 199203 2 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HIDAYATI, S.Pd**
Jabatan : **Fungsional Pengantar Kerja Sub Koordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. GESMALINDRA**
Jabatan : **Kepala Bidang Tenaga Kerja**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. GESMALINDRA

NIP. 19651009 199303 2 004

Payakumbuh, Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

HIDAYATI, S.Pd

NIP. 19790531 200501 2 013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA SUB KOORDINATOR PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BIDANG TENAGA KERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Lowongan Pekerjaan Yang Terdaftar	Persentase lowongan pekerjaan yang terdaftar	6 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja	Persentase pencari kerja yang dilayani	12 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 27.447.880,-	APBD
2.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 85.548.146,-	APBD
	TOTAL	Rp. 112.996.026,-	

KEPALA BIDANG TENAGA KERJA,



Ir. GESMALINDRA
NIP. 19651009 199303 2 004

Payakumbuh, Oktober 2023
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA SUB
KOORDINATOR PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA



HIDAYATI, S.Pd
NIP. 19790531 200501 2 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALDI SAFDIARTON, SH**
Jabatan : **Fungsional Mediator Hubungan Industrial**
Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Perlindungan
Tenaga Kerja

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. GESMALINDRA**
Jabatan : **Kepala Bidang Tenaga Kerja**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. GESMALINDRA
NIP. 19651009 199303 2 004

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

ALDI SAFDIARTON, SH
NIP. 19800513 201101 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA
BIDANG TENAGA KERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Hubungan Kerja Yang Harmonis Antara Pekerja dan Pengusaha	Persentase penurunan angka Pemutusan Hubungan Kerja	15 %
2.	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase perusahaan yang menjalankan peraturan ketenagakerjaan	4 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp. 54.345.976,-	APBD
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp. 5.647.800,-	APBD
2.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.538.150,-	APBD
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.079.150,-	APBD
	TOTAL	Rp. 87.611.076,-	

KEPALA BIDANG TENAGA KERJA,



Ir. GESMALINDRA
NIP. 19651009 199303 2 004

Payakumbuh, Oktober 2023
FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN
INDUSTRIAL SUB KOORDINATOR
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA



ALDI SAFDIARTON, SH
NIP. 19800513 201101 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG HERMANTO, ST, MSE, MA**

Jabatan : **Kepala Bidang Perindustrian**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUNIDA FATWA, Sos.M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

BAMBANG HERMANTO, ST, MSE, MA
NIP. 19791004 200501 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Industri Pengolahan	Persentase peningkatan kapasitas industri pengolahan	2.87 %
2.	Meningkatnya Kualitas Produksi Industri Pengolahan	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	9.29 %

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 903.442.888,-	APBD
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 357.838.140,-	APBD
	TOTAL	Rp. 1.261.281.028,-	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,



YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2023
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN



BAMBANG HERMANTO, ST, MSE, MA
NIP. 19791004 200501 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENDI PRATAMA, S.I.A**
Jabatan : **Fungsional Penyuluh Perindustrian**
Sub Koordinator Industri Pangan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAMBANG HERMANTO, ST, MSE, MA**
Jabatan : **Kepala Bidang Perindustrian**

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

BAMBANG HERMANTO, ST, MSE, MA
NIP. 19791004 200501 1 006

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

RENDI PRATAMA, S.I.A
NIP. 19880907 201101 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN
SUB KOORDINATOR INDUSTRI PANGAN
BIDANG PERINDUSTRIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Standardisasi Mutu Produk Industri Pengolahan	Jumlah produk industri yang mendapatkan sertifikat industri	58
		Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	9 %
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM Industri Pengolahan	Persentase SDM industri pengolahan yang kompeten	1 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI), IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Rp. 357.838.140,-	APBD
2.	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 174.593.340,-	APBD

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp. 555.687.870,-	APBD
	TOTAL	Rp. 1.088.119.350,-	

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,



BAMBANG HERMANTO, ST, MSE, MA
NIP. 19791004 200501 1 006

Payakumbuh, Oktober 2023
FUNGSIONAL PENYULUH
PERINDUSTRIAN
SUB KOORDINATOR INDUSTRI PANGAN



RENDI PRATAMA, S.I.A
NIP. 19880907 201101 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVIT ARDY. S.Sos,MM**
Jabatan : **Kepala UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **YUNIDA FATWA, Sos.M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

NOVIT ARDY, S.Sos. MM
NIP. 19800620 200901 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan	Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan dalam kondisi baik	75%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	APBD
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 507.653.731,-	APBD
	TOTAL	Rp. 507.653.731,-	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,



YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
 NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2023
 KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG



NOVIT ARDY, S.Sos. MM
 NIP. 19800620 200901 1 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENDY ROZENO, A.Md**
Jabatan : **Kasubag Tata Usaha UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NOVIT ARDY, S.Sos. MM**
Jabatan : **Kepala UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

NOVIT ARDY, S.Sos. MM
NIP. 19880907 201101 1 002

Payakumbuh, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

RENDY ROZENO, A.Md
NIP. 19871209 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBAG TATA USAHA UTPD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan	Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan yang dipelihara	75%

KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN
PENGEMBANGAN RENDANG,



NOVIT ARDY, S.Sos. MM
NIP. 19880907 201101 1 002

Payakumbuh, Oktober 2023
KASUBAG TATA USAHA UTPD PUSAT
PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN
RENDANG




RENDY ROZENO, A.Md
NIP. 19871209 201101 1 001

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%
2. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A

Payakumbuh, Desember 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh




NIDA FATWA, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 560/49/KEPT-DTKP/2023

T E N T A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan kebutuhan teknis dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu dilakukan penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan

- Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Republik Indonesia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
 11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD;
6. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh;
7. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
2. IKU OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

1. Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis OPD Tahun 2012-2017;
2. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas;
3. Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

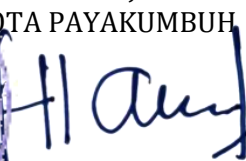
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH




VINDA FATWA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk PJ Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Inspektorat Kota Payakumbuh
3. Arsip

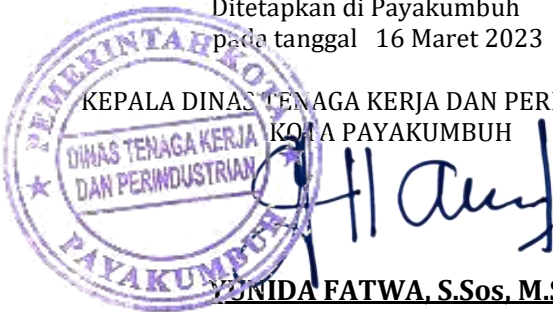
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
 Nomor : 560/ 49/KEPT-DTKP/2023
 Tanggal : 16 Maret 2023
 Tentang : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan
 Perindustrian Kota Payakumbuh

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Cara Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja Tahun n di bagi jumlah angkatan kerja tahun n kali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	Memenuhi SPM Kementerian Perindustrian	Nilai Produksi Th n - Nilai Produksi Th n-1 di bagi Nilai Produksi Th n-1 kali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
 KOTA PAYAKUMBUH



NIDA FATWA, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670601 198809 2 001